bankriaukepri
Tumbuh Kembangkan Usaha

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK RIAU KEPRI TAHUN 2017



bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ---------- i

PENDAHULUAN ---------- 1

KEBIJAKAN, PROGRAM, STRUKTUR, MEKANISME TATA KELOLA DAN UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA ---------- 2

KEBIJAKAN TATA KELOLA BANK ---------- 2

PROGRAM PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TATA KELOLA YANG BAIK ---------- 3

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN ---------- 3

UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA BANK ---------- 3

PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK RIAU KEPRI ---------- 4

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ---------- 4

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS ---------- 5

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ---------- 6

DEWAN KOMISARIS ---------- 11

Komposisi Dewan Komisaris ---------- 11

Kriteria Dewan Komisaris ---------- 12

Independensi Dewan Komisaris ---------- 13

Pernyataan Independensi Komisaris Independen ---------- 14

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris ---------- 14

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris ---------- 14

Pemenuhan Ketentuan *Fit & Proper Tes* ---------- 15

Tugas Dewan Komisaris ---------- 16

Wewenang Dewan Komisaris ---------- 17
Kinerja Dewan Komisaris ---------- 18
Rapat Dewan Komisaris ---------- 20
Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris ---------- 25
Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris ---------- 25
Program Orientasi Dewan Komisaris ---------- 26
Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris ---------- 27
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ---------- 30
Komisaris Independen ---------- 31

DIREKSI ---------- 32
Kriteria Direksi ---------- 32
Komposisi Direksi ---------- 34
Uji Kelayakan dan Kepatutan Direksi ---------- 34
Tugas dan Tanggung jawab Direksi ---------- 35
Tugas dan Tanggung jawab Masing-masing Direksi ---------- 36
Independensi Direksi ---------- 38
Rangkap Jabatan Direksi ---------- 39
Kepemilikan Saham Direksi ---------- 39
Rapat Direksi ---------- 39
Penilaian Kinerja Direksi ---------- 51
Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi ---------- 52
Program Pelatihan dan Seminar Direksi ---------- 53
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ---------- 57

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI ---------- 58
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah ---------- 58
Komposisi Pegawai ---------- 58

KOMITE AUDIT ---------- 60
Susunan Anggota Komite Audit ---------- 60
Keahlian dan Independensi Komite Audit ---------- 61
Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit ---------- 61
Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Audit ---------- 62
Aktivitas Rapat Komite Audit ---------- 63

KOMITE PEMANTAU RISIKO ---------- 67
Komposisi Komite Pemantau Risiko ---------- 67
Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko ---------- 68
Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko ---------- 69
Rencana dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko ---------- 70
Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko ---------- 70

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI ---------- 74
Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 74
Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 74
Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 75
Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 75
Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi ---------- 76

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF YANG DIMILIKI OLEH BANK ---------- 78
Komite Teknologi Informasi ---------- 78
Komite Manajemen Risiko ---------- 79
Komite Pembiayaan ---------- 81
Komite ALCO ---------- 82
Komite Kebijakan Perkreditan ---------- 84
Komite Sumber Daya Manusia ---------- 86
Komite Anti *Fraud* ---------- 87

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN ---------- 89

PENERAPAN FUNGSI DAN BUDAYA KEPATUHAN ---------- 89
Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan ---------- 89
Unit Kerja di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ---------- 93
Sistem Kepatuhan ---------- 95
Kegiatan Unit Kerja Kepatuhan ---------- 96

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN ---------- 97
Susunan Organisasi dan Panduan Kerja Audit Intern ---------- 98
Persyaratan Auditor Internal ---------- 98
Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal ---------- 99
Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ---------- 99
Laporan Kegiatan Audit Internal ---------- 100
Program Pengendalian Mutu ---------- 102

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN ---------- 103

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ---------- 104
Organisasi Manajemen Risiko ---------- 105
Kebijakan Manajemen Risiko ---------- 105
Laporan Profil Risiko ---------- 106
Pengelolaan Risiko ---------- 109
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi ---------- 110
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit ---------- 111
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian
Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko ---------- 111

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ---------- 112

RENCANA STRATEGIS BANK ---------- 113
Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank ---------- 113
Rencana Jangka Pendek ---------- 114
Rencana Jangka Menengah ---------- 116

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK --------- 118
KEPEMILIKAN SAHAM DAN *SHARES OPTION* ---------- 119
PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*) ---------- 120
PERMASALAHAN HUKUM ---------- 120
BUY BACK SHARES DAN *BUY BACK* OBLIGASI BANK ---------- 122

UNIT USAHA SYARIAH (UUS) ---------- 122
Dewan Pengawas Syariah (DPS) ---------- 122
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) ---------- 123
Pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS) ---------- 124
Opini dan Aktivitas Dewan Pengawas Syariah ---------- 124
Frekuensi Rapat ---------- 126
Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS ---------- 128
Jumlah Penyimpangan (Internal *Fraud*) dan Permasalahan Hukum Yang Terjadi -------- 128
Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya ---------- 129
Penggunaan Konsultan atau Penasehat ---------- 129

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK ---------- 129

KEGIATAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK TAHUN 2017 ---------- 131
Penilaian Penerapan Tata Kelola oleh Pihak Eksternal (Third party assessment) --------- 131
Penghargaan Tata Kelola Perusahaan ---------- 131

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN TATA KELOLA BANK ---------- 132

PENDAHULUAN

Bank Riau Kepri memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan merupakan hal penting dalam menjaga kelangsungan usaha yang sehat dan dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham (*shareholders*) serta memelihara dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kepercayaan s*takeholders* sebagai pemangku kepentingan, merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank. Kredibilitas Bank dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank.

Bank Riau Kepri memiliki pedoman Tata Kelola yang dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai kesinambungan usaha yang memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Tata Kelola Bank Riau Kepri disusun berdasarkan pada prinsip- prinsip:

Transparansi : Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas : Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi. Bank Riau Kepri sebagai perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

Responsibilitas : Bank Riau Kepri berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.

Independensi : Organ-organ perusahaan Bank Riau Kepri menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank Riau Kepri berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Fairness : Bank Riau Kepri senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi. Bank Riau Kepri juga selalu memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN, PROGRAM, STRUKTUR, MEKANISME TATA KELOLA DAN UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA

KEBIJAKAN TATA KELOLA BANK

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut khususnya yang menyangkut dengan kebijakan Tata Kelola Bank, hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor 082/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola yang Baik, selain telah menerbitkan Kebijakan tentang *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan) sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 67/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013, Bank pada tahun 2015 telah menerbitkan ketentuan mengenai Pedoman Kerja Direksi sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 58/KEPDIR/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

Pada tahun 2016, Kebijakan Direksi tersebut di atas diubah dan disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan otoritas Bank terkini sebagaimana termuat di dalam SK Direksi No. 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Di dalam pedoman kerja Direksi diatur secara tegas mengenai fungsi, persyaratan, komposisi, tugas dan tanggung jawab Direksi, etika kerja dan jabatan, waktu kerja, hak dan kewenangan, pengaturan mengenai rapat Direksi serta komite-komite yang berada di bawah Direksi.

Sebelumnya pada tahun 2014 Bank juga telah menerbitkan ketentuan mengenai pedoman kerja Dewan Komisaris sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014.

Di dalam pedoman kerja Dewan Komisaris diatur secara tegas mengenai persyaratan, komposisi serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika jabatan, waktu kerja Dewan Komisaris, pengaturan mengenai rapat Dewan Komisaris dan organ-organ yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi tersebut akan dievaluasi secara berkala untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROGRAM PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TATA KELOLA YANG BAIK

Dalam rangka pengenalan dan pemahaman Tata Kelola yang Baik kepada pegawai di lingkungan Bank, Divisi Kepatuhan telah memberikan sosialisasi/pelatihan terkait Kebijakan Tata Kelola Bank, Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct)* dan *Whistleblowing System* yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan adanya program pengenalan dan pemahaman Tata Kelola yang Baik yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan tersebut diharapkan akan mampu membangun kesadaran tentang arti pentingnya Tata Kelola Bank yang baik dalam setiap aktivitas operasional Bank.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata kelola Bank Riau Kepri secara garis besar tergambarkan pada organ utama perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu Bank Riau Kepri juga membentuk organ pendukung Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Sedangkan organ pendukung Direksi terdiri dari Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Anti *Fraud.*

Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance.*

UNIT KERJA PENGELOLA TATA KELOLA BANK

Saat ini Bank Riau Kepri telah menyempurnakan struktur dan tata kelola Bank sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Di dalam Keputusan Direksi tersebut ditetapkan bahwa Divisi Kepatuhan di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas sebagai pengelola Tata Kelola Bank. Salah satu bentuk pengelolaan Tata Kelola Bank yang dilakukan adalah melaksanakan internalisasi pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, berupa pengenalan dan penerapan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik kepada seluruh pegawai Bank, melalui sosialisasi tentang Tata Kelola yang Baik, Kode Etik Kepatuhan dan *Whistle Blowing System.*

Selain itu, setiap periode Semester Divisi Kepatuhan juga melakukan penilaian sendiri *(self assesment)* pelaksanaan Tata Kelola Bank yang hasil penilaiannya disampaikan di dalam Laporan Tingkat Kesehatan Bank untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK RIAU KEPRI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan. Hal-hal yang dibicarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham dimuat di dalam Akta RUPS baik yang sifatnya Tahunan maupun Luar Biasa.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris bersama Direksi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS pada tahun 2016 terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank berakhir. Materi yang disampaikan di dalam RUPS Tahunan, meliputi antara lain :

1. Penyampaian laporan tahunan Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
2. Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan.
4. Penetapan penggunaan laba, dalam hal Bank mempunyai saldo laba yang positif.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Untuk RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Bank guna membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Bank.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaran RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diatur di dalam Anggaran Dasar Bank Riau Kepri yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam anggaran dasar Bank diatur mengenai tata cara pemanggilan RUPS, antara lain sebagai berikut :

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Panggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan.

Untuk penyelenggaraan RUPS tahun 2017, Bank telah menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :

PEMBERITAHUAN JADWAL DAN AGENDA RUPS		
Tanggal Pelaksanaan RUPS	**Tujuan Surat**	**Mata Acara RUPS**
03 Maret 2017	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau. • Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016. • Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016. • Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2017. • Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2017. • Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2017. • Lain-lain dianggap perlu.
04 Maret 2017	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau. • Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor yang Telah Disetor. • Persetujuan Rencana Penambahan Modal Disetor tahun 2017. • Rencana *Spin Off* Syariah. • Rencana penerbitan Obligasi. • Penetapan Cadangan Tujuan. • Penetapan Dewan Pengawas Syariah.

		• Penetapan Pengurus Perseroan. • Lain-lain dianggap perlu.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Sepanjang Tahun 2017, Bank telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN		
Jadwal	**Tempat**	**Agenda Rapat**
03 Maret 2017	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	• Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016. • Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016. • Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2017. • Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2017. • Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2017. • Lain-lain dianggap perlu.

RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Bapak H.R. Mambang Mit. Penunjukan Komisaris Utama sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (6) dan (7) anggaran dasar Bank.

RUPS Tahunan Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Tahunan menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan tahun buku 2016 sesuai dengan komposisi :

Alokasi Pembagian Laba Bersih	Komposisi	Nominal (Rp)
1. Dividen Tunai	60%	271.713.242.726
2. Dividen Saham	10%	45.285.540.454
3. Cadangan Umum	30%	135.856.621.363
Laba Bersih yang Dibagi	**100%**	**452.855.404.543**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan apabila terdapat pemegang saham yang keberatan untuk menambah setoran modal dari bagian dividen sebesar 10% maka dikembalikan kepada komposisi saham 60% dividen dan 40% cadangan umum.

3. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi dan tantiem tahun buku 2016 yang telah menjadi biaya tahun buku 2016 dengan komposisi sama dengan tahun buku sebelumnya sesuai dengan tabel yang diusulkan.
4. Menyetujui komposisi cadangan jasa produksi dan tantiem tahun buku 2017 sama dengan tahun buku 2016 masing-masing jasa produksi sebesar 22,5% dan tantiem sebesar 2,5%.
5. Menyetujui penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2017 sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dan telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2017, yang pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi dengan memprioritaskan penggunaan dana untuk fakir miskin dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
6. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Terbatas PT. Bank Riau Kepri tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.
7. Menyetujui penetapan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri tahun 2017 adalah sebesar Rp40.584.313.113,- (empat puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah) sesuai dengan tabel yang diajukan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merekomendasikan kepada manajemen Bank Riau Kepri untuk memperhatikan peningkatan gaji karyawan.

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Tahunan ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor : 03 tanggal 03 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Riau Kepri.

Selain menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun 2017, Bank juga telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu sebagai berikut :

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA		
Jadwal	**Tempat**	**Agenda Rapat**
04 Maret 2017	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	• Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor yang Telah Disetor. • Persetujuan Rencana Penambahan Modal Disetor Tahun 2017. • Rencana *Spin Off* Syariah. • Rencana Penerbitan Obligasi. • Penetapan Cadangan Tujuan. • Penetapan Dewan Pengawas Syariah. • Lain-lain dianggap perlu. • Penetapan Pengurus Perseroan.

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Bapak H.R. Mambang Mit. Penunjukan Komisaris Utama sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (6) dan (7) anggaran dasar Bank, bahwa apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS Luar Biasa dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

RUPS Luar Biasa Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 04 Maret 2017 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui tambahan modal disetor sebesar Rp7.700.100.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta seratus ribu rupiah), yaitu sebagai berikut :
   - Setoran modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
   - Titipan modal disetor Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang disahkan sebagai Modal Disetor sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Menyetujui rencana tambahan modal disetor tahun 2017 sesuai dengan usulan masing-masing pemegang saham :
   - Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
   - Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
   - Pemerintah Kabupaten Meranti sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
   - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah).
3. Menyetujui penyetoran saham seri B oleh Koperasi Karyawan Bank Riau sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Meyetujui atas rencana *spin off* Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri pada tahun 2018 dalam pelaksanaannya perlu dilakukan kajian.
5. Menyetujui atas penerbitan obligasi Bank Riau Kepri dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk penetapan nominal obligasi yang direncanakan, tetapi harus di-*back up* dengan kajian yang lebih mendalam lagi.
6. Menyetujui pengalihan cadangan tujuan sebesar Rp523.137.482.477,- (lima ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dia ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
7. Menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sampai adanya Dewan Pengawas Syariah yang definitif, yaitu :
   - DR. H. Suryan Al Jamrah, MA : Ketua;
   - Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA : Anngota,

   dan agar segera dilakukan proses pemilihan calon Dewan Pengawas Syariah periode berikutnya.
8. Menyetujui atas kajian rencana penyertaan modal perseroan terbatas PT. Bank Riau Kepri di perseroan terbatas PT. Jamkrida Riau.
9. Menyetujui untuk memberi keputusan dan/atau kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti masing-masing temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tersebut di atas dengan memperrhatikan kajian dan analisa oleh pihak independen yang ahli dalam bidangnya.
10. Penetapan Pengurus Perseroan :
    a. Menyetujui pengangkatan Saudara Taufiqurrahman sebagai Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal RUPS LB ini ditutup.
    b. Menunda penetapan Komisaris Non Independen.
    c. Untuk penetapan Calon Direktur Dana dan Jasa dan Direktur Kredit dan Syariah menunggu persetujuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan selanjutnya memberi kewenangan kepada Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau untuk menetapkannya.
    d. Menyetujui menetapkan Saudara Eka Afriadi untuk diperpanjang masa jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sampai periode selanjutnya yaitu 05-07-2017 (lima juli tahun dua ribu tujuh belas) sampai dengan 04-07-2021 (empat juli tahun dua ribu dua puluh satu).

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Luar Biasa ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor : 04 tanggal 04 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri

Untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut, Bank telah menuangkan hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 01 tanggal 03 April 2017 yang dibuat dihadapan Feri Mondro, SH, M.Kn, Notaris di Kota Pekanbaru.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan/penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan yang termuat di dalam akta tersebut.

Di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, memuat hal-hal sebagai berikut :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT	
No dan Tanggal Akta	**Keputusan Rapat**
Akta Nomor 01 Tanggal 03 April 2017	1. Menyetujui tambahan modal disetor sebesar Rp7.700.100.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta seratus ribu rupiah), yaitu sebagai berikut : - Setoran modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah); - Titipan modal disetor Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang disahkan sebagai Modal Disetor sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). 2. Menyetujui penyetoran saham seri B oleh Koperasi Karyawan Bank Riau sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 3. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan tahun buku 2016 sesuai dengan komposisi : a. Dividen Tunai, komposisi 60% senilai Rp271.713.242.726,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). b. Dividen Saham, komposisi 10% senilai Rp45.285.540.454,- (empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). c. Cadangan Saham, komposisi 30% senilai Rp135.856.621.363,- (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Total Komposisi berjumlah 100% dengan nilai seluruhnya Rp452.855.404.543 (empat ratus lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah). 4. Menyetujui pengangkatan Saudara Taufiqurrahman sebagai Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri dengan masa

	jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal RUPS LB ini ditutup. 5. Menyetujui menetapkan pengangkatan perpanjangan masa jabatan Saudara Eka Afriadi sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sampai periode selanjutnya yaitu 05-07-2017 (lima juli tahun dua ribu tujuh belas) sampai dengan 04-07-2021 (empat juli tahun dua ribu dua puluh satu). Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut : <u>Susunan Dewan Komisaris</u> - Komisaris Utama : Mambang Mit - Komisaris Independen : Abdul Rivaie Rachman - Komisaris Independen : Taufiqurrahman <u>Susunan Direksi</u> - Irvandi Gustari : Direktur Utama - Denny Muliya Akbar : Direktur Operasional - Eka Afriadi : Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan, yaitu :

Nomor dan Tanggal Akta	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan		
	Nomor Pemberitahuan	Tanggal Pemberitahuan	Perihal
Akta Nomor 01 Tanggal 03 April 2017	AHU-AH.01.03-0124358	05 April 2017	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa untuk susunan keanggotaan Dewan Komisaris ditetapkan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling

banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berdomisili di Pekanbaru sebagai kota kedudukan kantor pusat Bank Riau Kepri.

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, sepanjang tahun 2017 anggota Dewan Komisaris Bank yang tercatat di dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Mambang Mit	Komisaris Utama
A. Rivaie Rachman	Komisaris Independen
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen

** Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 04 Maret 2017*

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*).

Untuk persyaratan anggota Dewan Komisaris Bank sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

A. Persyaratan Umum:

Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia :

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
3) Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4) Sehat jasmani dan rohani.
5) Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
7) Tidak menjabat sebagai pengurus pada partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

B. Persyaratan Khusus

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi Persyaratan Khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.

C. Persyaratan Lainnya

1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
2) Persyaratan lainnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia/OJK.
3) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota direksi.

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Tata Kelola yang Baik, bahwa untuk pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur mengenai kriteria Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

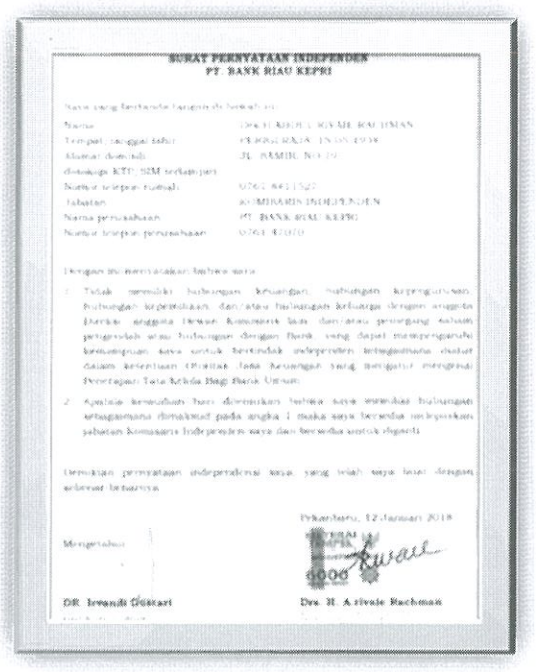
Sehubungan hal tersebut di atas seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di atas. Selain hal tersebut Komisaris Independen Bank telah membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mambang Mit	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
A. Rivaie Rachman	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Taufiqurrahman	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen Bank telah membuat Surat Pernyataan Independensi untuk menyatakan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.


SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RIAU KEPRI


PT. BANK RIAU KEPRI

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pelaksanaan Tata Kelola, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :

a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsi dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sesuai hal tersebut di atas, maka untuk jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN KOMISARIS			
Nama	**Jabatan di Bank Riau Kepri**	**Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain**	**Nama Perusahaan/Instansi Lain**
Mambang Mit	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
A. Rivaie Rachman	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada
Taufiqurrahman	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada

Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sepanjang tahun 2017, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain, dengan rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS					
Nama	**Kepemilikan Saham**				
	Bank Riau Kepri	**Bank Lain**	**Lembaga Keuangan Non Bank**	**Perusahaan Lain**	**Keterangan**
Mambang Mit	-	-	-	-	Nihil
A. Rivaie Rachman	-	-	-	-	Nihil
Taufiqurrahman	-	-	-	-	Nihil

Pemenuhan Ketentuan *Fit & Proper Tes*

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*). Dalam melaksanakan tugasnya selaku Komisaris Bank, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Persetujuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Persetujuan	Perihal
Mambang Mit	Surat OJK No. SR-24/KO.5411/2015	07 Mei 2015	Pengangkatan Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Saudara.
A. Rivaie Rachman	Surat BI No. 8/144/GBI/DPIP/Rahasia	04 Desember 2006	Keputusan atas Pencalonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau
	Surat BI No. 13/18/DPB1/APBU/Pbr	14 Maret 2011	Perpanjangan Masa Jabatan Komisaris Bank Saudara
	Surat OJK No. SR-22/KO.5411/2015	21 April 2015	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
Taufiqurrahman	Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017	22 Juni 2017	Pengangkatan dan Pencatatan Masa Jabatan Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri.

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah setara.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan/ Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

5. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal Perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainya (KUD/Kebijakan Umum Direksi, *Corporate Plan, Business Plan*) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan PT. Bank Riau Kepri baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practices*.
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi menerapkan secara efektivitas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance,* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.
6. Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) orang diantara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris.
7. Dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite/unit kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, dan wewenang serta pemberhentian komite/unit kerja diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban Perseroan.

Kinerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Tahunan, dan Program Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan prinsip Tata Kelola diterapkan dengan baik.

Dalam menjalankan program kerja dimaksud, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Program Kerja Dewan Komisaris selama tahun 2017 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan perpanjangan masa kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Persetujuan atas Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi perihal Rekomendasi Remunerasi Pengurus PT. Bank Riau Kepri.
3. Persetujuan atas Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi perihal Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

4. Persetujuan atas Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi perihal Rekomendasi Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Riau Kepri.
5. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Tahun 2017.
6. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Tahun 2018.
7. Persetujuan atas draft BPP Penanganan Kredit Bermasalah.
8. Persetujuan atas draft BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
9. Persetujuan atas draft BPP Penerapan Program APU dan PPT.
10. Persetujuan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
11. Persetujuan Calon Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
12. Persetujuan Revisi RKAT tahun 2017.
13. Persetujuan Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
14. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk audit Laporan Keuangan Bank tahun buku 2017.
15. Menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Bank tahun 2016 kepada Pemegang Saham Pengendali Bank.
16. Menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
17. Menyampaikan Laporan Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2016.
18. Menyampaikan Laporan Hasil *Review* SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan.
19. Menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
20. Saran atas Pengaturan Biaya Tutup Buku Akhir Tahun.
21. Saran atas Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
22. Saran atas Rencana Pendanaan Proyek Sindikasi.
23. Tanggapan dan Saran atas Tindak Lanjut Temuan OJK dan BPK.
24. Tanggapan atas Temuan *Off Site* Bank.
25. Tanggapan atas Sanksi Kewajiban Membayar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
26. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi Bank.
27. Tanggapan atas Laporan Pelaksanaan Komitmen Pengembangan Bank.
28. Tanggapan atas Laporan Hasil Audit Umum dan Audit Khusus pada beberapa jaringan kantor Bank.
29. Tanggapan atas Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola Bank, ditegaskan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan pelaksanaannya dapat menggunakan teknologi telekonferensi. Rapat Dewan Komisaris tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan, dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan dihadiri oleh anggota Komisaris, atau dengan mengundang Direksi dan/atau pejabat Bank terkait.

Sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris Bank telah melaksanakan 26 (dua puluh enam) kali pertemuan/rapat, baik yang diselenggarakan oleh internal Komisaris maupun rapat dengan mengundang Direksi, atau pejabat/pegawai Bank lainnya, yang terlihat pada tabel berikut :

AKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	9 Januari 2017	1. Tindak Lanjut temuan OJK dan BPK 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan
2	19 Januari 2017	1. Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Desember 2016 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan
3	8 Februari 2017	1. Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Buku 2016 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan
4	13 Februari 2017	1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT. Bank Riau Kepri Semester II Tahun 2016 2. Dan lain - lain	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman
5	21 April 2017	1. Membahas tentang kepengurusan	1. H.R. Mambang Mit

		komite pada PT. Bank Riau Kepri 2. Membahas tindak lanjut dari Keputusan RUPS Tahunan PT. Bank Riau Kepri, Jumat 3 Maret 2017, dan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri, sabtu tanggal 4 Maret 2017	2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman
6	30 Mei 2017	1. Permohonan persetujuan Penanganan Kredit bermasalah PT. Bank Riau Kepri dari Direksi ke Dewan Komisaris 2. Penjelasan poin-poin perubahan pada permohonan persetujuan pedoman penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri 3. Hal-hal yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Operasional 5. Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
7	21 Juni 2017	Pembahasan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2017 PT. Bank Riau Kepri	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 7. Pemimpin SKAI 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Mikro Kecil dan Menengah 10. Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah 11. Pemimpin Divisi MSDM 12. Pemimpin Divisi Konsumer
8	14 Juli 2017	1. Tindak Lanjut Pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 21 Juni 2017 2. Dan lain-lain	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman
9	28 Juli 2017	1. Membahas Laporan Tingkat Kesehatan Bank Bulan Juni 2017 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
10	1 Agustus 2017	1. Tindak Lanjut Temuan BPK 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Utama 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Direktur Operasional 7. Pemimpin Divisi

			Kepatuhan
11	1 Agustus 2017	1. Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional 6. Pemimpin Divisi Hukum 7. Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
12	22 Agustus 2017	Pembahasan hasil pemeriksaan umum terhadap Jaringan Kantor PT. Bank Riau Kepri Tahun 2017	1. Taufiqurrahman 2. Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4. OJK Provinsi Riau
13	18 September 2017	1. Membahas hasil kerja mengenai Progress dari pekerjaan Kajian Spin Off & Feasibility Study Unit syariah PT. Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah oleh tim Konsultan PT. Batasa Tazkia di hadapan Direksi & Komisaris 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. Taufiqurrahman 3. Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional 6. Pemimpin Divisi Syariah 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 8. Pemimpin Divisi Kepatuhan 9. Pemimpin Divisi MSDM
14	19 September 2017	1. Pembahasan Pengurus Bank, Remunerasi Pengurus dan Update Syariah. 2. Hal – hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Utama 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Direktur Operasional 7. Pemimpin Divisi MSDM
15	19 September 2017	1. Perkembangan hasil Seleksi Direksi PT. Bank Riau Kepri 2. Hal – hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman
16	22 September 2017	1. Persetujuan Draft BPP Penerapan Program APU dan PPT 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan
17	6 Oktober 2017	1. Progres pekerjaan terkait kajian spin-off syariah 2. Pengembangan struktur organisasi terkait pemberlakuan SOT dalam rangka penguatan UUS dan persiapan spin-off syariah 3. Opsi modal terkait model spin-off untuk mendirikan BUS Bank Riau Kepri	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional 6. Pemimpin Divisi MSDM 7. Pemimpin Divisi Syariah 8. Pemimpin Divisi

			Perencanaan Strategis
18	16 Oktober 2017	Tindak Lanjut untuk Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2015	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Tenaga Ahli Pengawasan
19	30 Oktober 2017	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum Terhadap PT. BPD Riau Kepri Tahun 2017	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. A. Rivaie Rachman 4. Direktur Utama 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Direktur Operasional
20	6 November 2017	1. Membahas tentang Kredit Sindikasi dan Kinerja BRK 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu (Kinerja)	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional
21	7 November 2017	Membahas Pencapaian Laba Tahun 2017	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
22	9 November 2017	1. Membahas hasil Temuan BPK RI tahun 2015 2. Memberikan tanggapan dan kesimpulan atas temuan BPK RI 2015 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. A. Rivaie Rachman 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan
23	10 November 2017	1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Riau Kepri Menjelang Akhir Tahun 2017 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. Taufiqurrahman 3. A. Rivaie Rachman
24	27 November 2017	1. Membahas tentang Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional
25	12 Desember 2017	1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 2. Rencana Obligasi PT. Bank Riau Kepri 3. Tindak Lanjut Pemilihan Pengurus PT. Bank Riau Kepri 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Utama 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Direktur Operasional
26	22 Desember 2017	1. Pembahasan Konsolidasi Persiapan	1. H.R. Mambang Mit

		Tutup Buku Tahun 2017 2. Hal-hal lain yang perlu dibahas	2. A. Rivaie Rachman 3. Taufiqurrahman 4. Direktur Utama 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Direktur Operasional 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 8. Pemimpin SKAI 9. Unit Kerja terkait

Rapat di atas merupakan rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan anggaran dasar Bank telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang mengikat.

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk jika terdapat adanya *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan para peserta rapat, selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan pejabat Bank Riau Kepri lainnya, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

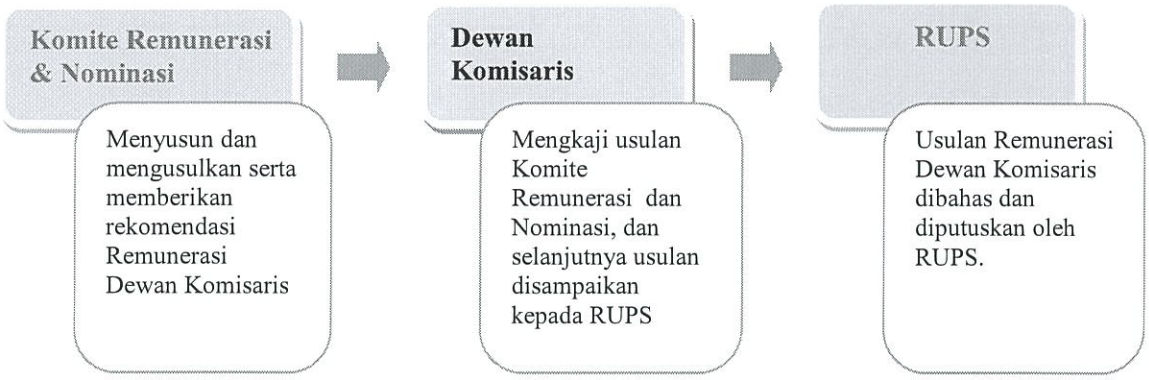
Nama	Jumlah Kehadiran (Total 26 kali Rapat)			% Kehadiran
	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi/Divisi	Rapat Internal Dewan Komisaris	Total Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris	
Mambang Mit	19	5	24	92%
A. Rivaie Rachman	15	5	20	77%
Taufiqurrahman*	17	4	21	95%

**** Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 04 Maret 2017***

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Bank didasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Anggaran Dasar Bank, dan Keputusan Direksi Nomor 64/KEPDIR/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Keputusan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS, dengan mekanisme sebagai berikut :



Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp10.576.165.305,-.

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 terlihat dalam tabel berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	4*	10.449.456.335,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	126.708.970,-
Jumlah Penerimaan		**10.576.165.305,-**

Keterangan :

* Sepanjang tahun 2017 jumlah Komisaris Bank adalah tiga orang, namun untuk pembayaran tantiem tahun 2016 selain dibayarkan kepada tiga orang Komisaris Bank, juga dibayarkan kepada seorang Komisaris Independen (Sarjono Amnan) yang masa jabatannya berakhir per 31 Agustus 2016.

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 terlihat dalam tabel berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi (Rp)
1	Gaji	1.984.320.000
2	Pakaian Dinas	74.700.000
3	Cuti	-
4	THR	524.160.000

5	Tunjangan Perumahan	94.050.000
6	Tunjangan Listrik	78.501.955
7	Tunjangan Telepon	30.157.427
8	Tunjangan Kesehatan	18.049.588
9	Tunjangan Hari Tua	343.617.943
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	1.814.249.896
11	Tunjangan Pajak	1.814.816.319
12	Tantiem	3.799.542.177
Total		**10.576.165.305**

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2017 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah :

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	2
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	1*
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1**
Rp 500 juta ke bawah	-
Total	**4*** **

Keterangan :

* Untuk kelompok nominal remunerasi di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar adalah Komisaris Independen (Taufiqurrahman) yang menjabat sebagai Komisaris Independen per 04 Maret 2017.

** Untuk kelompok nominal remunerasi di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar adalah Komisaris Independen (Sarjono Amnan) yang masa jabatannya berakhir per 31 Agustus 2016.

*** Sepanjang tahun 2017 jumlah Komisaris Bank adalah tiga orang, namun untuk pembayaran tantiem tahun 2016 selain dibayarkan kepada tiga orang Komisaris Bank, juga dibayarkan kepada seorang Komisaris Independen (Sarjono Amnan) yang masa jabatannya berakhir per 31 Agustus 2016.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Dewan Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai Bank wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat.
2. Tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk.

3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi antara lain meliputi :

   a. Gambaran mengenai Bank yang berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.

   b. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Bank.

   c. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.

   d. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

   e. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

   f. Sebagai *team building,* yaitu bahwa seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris

Pada tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/*workshop* baik yang diselenggarakan oleh pihak internal, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia.

Nama	Jenis Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan
Mambang Mit (Komisaris Utama)	Seminar Tata Kelola BUMD Seiring Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Divisi MSDM	23-01-2017
	Workshop Penerbitan Obligasi	Divisi MSDM	24-02-2017
	Workshop Optimalisasi Peran Pengawasan Pembinaan Dewan Komisaris dan Komite	Risk Management Guard (RMG)	04-04-2017
	Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	OJK	05-04-2017
	Seminar Komisaris Wilayah Barat : Ekonomi *Out Looks* 2017 Ketimpangan dan Peran Perbankan	FKDKP	07-04-2017
	Workshop Sharia In Practice	Risk Management Guard (RMG)	08-06-2017

	Workshop Development Of Corporate Level BSC	Divisi Perencanaan Strategis	10-07-2017
	Workshop Penerapan PSAK 71	FKDK/P BPD Wilayah Barat	25-07-2017
	Seminar Penilaian *Mutual Evaluation Review* Terhadap Indonesia oleh APG dan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia	LPPI	06-09-2017
	4th Asian *Fixed Income Summit*	SMF	07-09-2017
	Workshop Komisaris: Regulasi OJK-Parameter-Strategi Likuiditas	FKDK/P BPD	19-10-2017
	Sosialisasi Transaksi Non Tunai Di Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau	Divisi Produk Dana dan Jasa	27-10-2017
	Seminar Nasional *Political Economy Outlook* di Tahun 2018 - 2019 (Masa Depan *Consumer Banking* di Era Disrupsi)	The Consumer Banking School	22-11-2017
	Seminar Arah Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan	FDKP	07-12-2017
	Sosialisasi Regulasi Terkait BUMD	Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI	13-12-2017
A. Rivaie Rachman (Komisaris Independen)	Seminar Tata Kelola BUMD Seiring Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Divisi MSDM	23-01-2017
	Workshop Optimalisasi Peran Pengawasan Pembinaan Dewan Komisaris dan Komite	Risk Management Guard (RMG)	04-04-2017
	Seminar Komisaris Wilayah Barat : Ekonomi *Out Looks* 2017 Ketimpangan dan Peran Perbankan	FDKP	07-04-2017
	Seminar FKDKP untuk Level Pengurus Bank	FDKP	24-05-2017

	Workshop Kebijakan Remunerasi Berdasarkan POJK No. 45/POJK/03/2015	Risk Management Guard (RMG)	09-06-2017
	Workshop Development Of Corporate Level BSC	Divisi Perencanaan Strategis	10-07-2017
	Workshop Komite Remunerasi : Tata Cara Melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Direktur Bank (Sudut Pandang Regulator, Komisaris dan Direktur)	Risk Management Guard (RMG)	20-07-2017
	Workshop Komisaris - Direksi – Komite Remunerasi – Kepatuhan : Strategi Persiapan *Fit & Proper Test* bagi Calon Direktur, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	Risk Management Guard (RMG)	27-09-2017
	Workshop Komisaris : Regulasi OJK-Parameter-Strategi Likuiditas	FKDK/P BPD	19-10-2017
Taufiqurrahman (Komisaris Independen)	*Workshop* Optimalisasi Peran Pengawasan Pembinaan Dewan Komisaris dan Komite	Risk Management Guard (RMG)	04-04-2017
	Seminar Komisaris Wilayah Barat : Ekonomi *Out Looks* 2017 Ketimpangan dan Peran Perbankan	FDKP	07-04-2017
	Seminar Internasional *"Changing Consumer Behaviour Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection"*	OJK	04-05-2017
	Seminar FKDKP untuk Level Pengurus Bank	FDKP	24-05-2017
	Workshop Sharia In Practice	Risk Management Guard (RMG)	08-06-2017
	Workshop Development Of Corporate Level BSC	Divisi Perencanaan Strategis	10-07-2017
	Workshop Penerapan PSAK 71	FKDK/P BPD Wilayah Barat	25-07-2017
	Expand Leadership Program For BOD/BOC	CLDI	02-08-2017

	Workshop Mengukur dan Menentukan *Risk Appetite, Risk Tolerance & Risk Limit*	Risk Management Guard (RMG)	10-08-2017
	Seminar Penilaian *Mutual Evaluation Review* Terhadap Indonesia oleh APG dan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia	LPPI	06-09-2017
	Workshop IRRBB & *Stress Test* - Bedah *Consultative Paper* (CP) Peraturan OJK & *Stress Test*: Konsep, Strategi dan Tantangan Implementasi *Standar Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB)	Risk Management Guard (RMG)	14-09-2017
	Workshop Menyusun *Key Performance Indicator (KPI)* dan Remunerasi & Nominasi	The Consumer Banking School	19-10-2017
	Sosialisasi Transaksi Non Tunai Di Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau	Divisi Produk Dana dan Jasa	27-10-2017
	The Future Work: Leading in Disruption and Digital Banking Decade dan Antisipasi Krisis Siklus 10 Tahunan	The Consumer Banking School	07-12-2017

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris selain berpedoman pada anggaran dasar Bank dan BPP Pelaksanaan Tata Kelola Bank, juga mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Dewan Komisaris berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dengan organ kelengkapannya, dan dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Bank.

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
   a. Dasar Hukum
   b. Definisi dan istilah yang digunakan
2. Komisaris, meliputi :
   a. Visi, Misi dan Tujuan
   b. Fungsi

c. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris

d. Etika Jabatan

e. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

f. Waktu kerja

g. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berkaitan dengan Anggaran Dasar

h. Rapat Dewan Komisaris

i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

j. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

3. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris

a. Staf Ahli dan Komite-Komite

b. Sekretariat Dewan Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Penentuan Komisaris Independen Bank dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

j. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal :

   1) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
   2) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank pada prinsipnya diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pada Bank Riau Kepri, kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi telah diatur di dalam SK Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang telah diselaraskan dengan anggaran dasar Bank dan ketentuan pihak regulator.

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan lainnya dan beberapa syarat tambahan bagi Direktur Kepatuhan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

KRITERIA/PERSYARATAN DIREKSI			
Kriteria/Persyaratan	**Direktur Utama**	**Direktur Operasional**	**Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko**
Warga Negara Indonesia.	√	√	√
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	√	√	√
Mempunyai Akhlak dan Moral yang Baik.	√	√	√
Setia dan taat kepada NKRI.	√	√	√
Sehat jasmani dan rohani.	√	√	√
Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.	√	√	√
Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara dan perbuatan tercela dibidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.	√	√	√
Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan	√	√	√
Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.	√	√	√
Memiliki kompetensi, integritas dan reputasi/kelayakan keuangan yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).	√	√	√
Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.	√		
Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif pada Bank.	√	√	√
Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.	√	√	√
Sesama anggota Direksi dan antara Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.	√	√	√
Bagi calon Direksi yang berasal dari internal Bank minimal pernah menjadi pejabat eksekutif satu level dibawah Direksi atau sedang menjabat sebagai Pemimpin Divisi	√	√	√
Bagi calon Direksi dari eksternal Bank			

pernah menjadi pejabat eksekutif yang jabatannya satu level di bawah Direksi pada Bank Umum dan berpengalaman operasional memimpin Cabang Bank Umum sebelum menjadi Pejabat Eksekutif satu level di bawah Direksi serta memilki rekomendasi atau Surat Keterangan dari tempat bekerja sebelumnya	√	√	√
Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	√	√
Dilarang :			
Merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.	√	√	√
Merangkap jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat/daerah.	√	√	√
Merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan atau pertentangan kepentingan secara langsung/tidak langsung dengan perseroan yang dipimpinnya dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	√	√
Persyaratan Tambahan Untuk Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko			
Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama Bank dan/atau Wakil Direktur Utama			√
Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku			√
Memenuhi persyaratan independensi			√
Lulus *Fit and proper test*			√

Komposisi Direksi

Pengangkatan anggota Direksi Bank dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sepanjang tahun 2017, susunan pengurus Bank (Direksi) adalah sebagai berikut :

Nama Direksi	Jabatan	Periode Jabatan	
		Diangkat	Berakhir
Irvandi Gustari	Direktur Utama	2015	2019
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	2016	2020
Eka Afriadi*	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	2017	2021

* *Diperpanjang masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dengan periode masa jabatan 05 Juli 2017 s.d. 04 Juli 2021*

Uji Kelayakan Dan Kepatutan Direksi

Setiap anggota Direksi Bank memiliki pengalaman dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank, hal ini mengingat karena anggota Direksi Bank merupakan mantan dan pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif Bank. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and profer test)* Direksi.

Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana terungkap pada tabel di bawah ini :

PERSETUJUAN PENGANGKATAN DIREKSI BANK			
Nama Direksi	**Jabatan**	**Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan**	
		Nomor Surat	**Tanggal**
Irvandi Gustari	Direktur Utama	SR-24/KO.5411/2015	07 Mei 2015
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	SR-36/KO.54/2016	23 Februari 2016
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	SR-144/KO.053/2017	11 Juli 2017

Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Di samping hal tersebut Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Untuk memaksimalkan kinerja Direksi dalam rangka pengurusan Bank, diaturlah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang tertuang di dalam surat Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Kerja Direksi ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, keputusan-keputusan RUPS, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (*fairness*).

Sebagai bagian implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik, Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi yang di dalamnya mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Bank telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang di dalam Surat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 143/DK-BRK/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Masing-masing Direksi

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi Bank diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi, yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Direktur Utama

a. Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.

b. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham.

c. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

d. Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya.

e. Bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

f. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakanBank.

g. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal.

h. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh.

i. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank.

j. Menyiapkan Rencana Kerja Bank.

k. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank ditutup.

l. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur.

m. Direktur Utama berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

n. Direktur Utama berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank.

2. Tugas Direktur Dana dan Jasa

a. Direktur Dana & Jasa dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Dana & Jasa bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Dana & Jasa menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

3. Tugas Direktur Kredit dan Syariah

a. Direktur Kredit & Syariah dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Kredit & Syariah bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Kredit & Syariah menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

4. Tugas Direktur Operasional

a. Direktur Operasional dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Operasional bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Operasional menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

5. Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

a. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

d. Di samping melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, antara lain yaitu :

- Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank;
- Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktur lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya;
- Memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkat organisasi.
- Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
- Melaporkan kepada pihak otoritas perbankan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan.

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Irvandi Gustari	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Denny Muliya Akbar	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Eka Afriadi	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Jabatan rangkap Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI			
Nama Direksi	**Jabatan**	**Pada Bank Lain**	**Perusahaan Lain**
Irvandi Gustari	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada	Tidak ada

Kepemilikan Saham Direksi

Bank mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Untuk periode 31 Desember 2016, seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Rincian Kepemilikan Saham Direksi Bank adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI					
Nama	**Kepemilikan Saham**				
	Bank Riau Kepri	**Bank Lain**	**Lembaga Keuangan Non Bank**	**Perusahaan Lain**	**Keterangan**
Irvandi Gustari	-	-	-	-	Nihil
Denny Muliya Akbar	-	-	-	-	Nihil
Eka Afriadi	-	-	-	-	Nihil

Rapat Direksi

Di dalam Kebijakan Pedoman Tata Kelola Bank Riau Kepri dan Pedoman Kerja Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal tersebut di atas berdasarkan permintaan tertulis :

1. Seorang atau lebih Direktur.
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.

3. Permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2017 Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali, baik rapat internal Direksi, rapat Direksi dengan Komisaris maupun rapat Direksi dengan unit kerja terkait (rapat koordinasi). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	16 Januari 2017	Rapat Pembahasan Monitoring Penurunan NPL	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
2	20 Januari 2017	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Periode Desember 2016	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Seluruh Pemimpin Divisi
3	2 Maret 2017	1. Pembahasan Surat OJK No. SR-23/KO.053/2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Saudara 2. Pembahasan Surat OJK No, SR-28/KO.053/2017 Perihal Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Umum Tahun 2016	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Konsumer
4	4 April 2017	Tindak Lanjut Atas Permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. Permodalan Ekonomi Rakyat	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Mikro Kecil dan Menengah
5	5 April 2017	1. Evaluasi Pencapaian Kinerja UUS Triwulan I / Maret 2017 2. Progres Program Kerja Divisi Syariah 3. Progres Spin Off Bank Riau Kepri Syariah 4. Hal-hal Lain Yang dianggap Perlu	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Syariah
6	12 April 2017	Kebijakan Direksi tentang Pengelolaan Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Konsumer 4. Pemimpin Divisi Syariah 5. Pemimpin Divisi Mikro Kecil dan Menengah
7	5 Juni 2017	Persiapan Grand Launching Laku Pandai PT. Bank Riau Kepri	1. DR. Irvandi Gustar 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Umum 4. Pemimpin Divisi

			Teknologi Sistem Informasi 5. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
8	9 Juni 2017	Rapat Temuan Penyelenggaraan Laku Pandai Hasil On The Spot (OTS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Layanan Laku Pandai PT. Bank Riau Kepri Bersama Otoritas Jasa Keuangan	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M Akbar 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 6. Pemimpin Divisi Umum 7. OJK Provinsi Riau
9	4 Juli 2017	Tindak Lanjut Temuan OJK	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin SKAI 7. Pemimpin Divisi MSDM 8. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi
10	14 Juli 2017	Pembahasan Tindak Lanjut Pertemuan dengan Aspidsus Kejati Riau	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah 5. Pemimpin Divisi Hukum 6. Pemimpin SKAI 7. Pemimpin Tim Task Force Kredit
11	13-14 Juli 2017	Evaluasi Kinerja Triwulan II 2017 PT. Bank Riau Kepri	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Dewan Komisaris 5. Pemimpin Divisi/Desk/Tim Task Force 6. Pemimpin Cabang
12	14 Juli 2017	Rapat Pembahasan Surat OJK Provinsi Riau No. S-507/KO.053/2017 tgl. 11 Juli 2017 Perihal Teguran/Sanksi Laporan Pembukaan Layanan Kas	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Unit Kerja Terkait
13	19 Juli 2017	Rapat Presentasi Progress Pekerjaan Kajian Spin Off & Feasibility Study Oleh Divisi Syariah	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Syariah

			4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
14	25 Juli 2017	Rapat Pembahasan Perkiraan NPL sampai dengan Akhir bulan Juli 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Konsumer 4. Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah 5. Pemimpin SKAI
15	8 Agustus 2017	Temuan OJK Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2016 Komitmen s/d Desember 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin SKAI 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 7. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 8. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
16	22 Agustus 2017	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap Jaringan Kantor PT. Bank Riau Kepri Tahun 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Tim OJK
17	30 Agustus 2017	Pembahasan Brokers Asuransi	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi Konsumer 5. Pemimpin Divisi Mikro Kecil dan Menengah 6. Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah 7. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 8. Pemimpin SKAI Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan 10. Pemimpin Divisi Hukum
18	31 Agustus 2017	Pembahasan Laporan Bulanan Auditor Cabang Jakarta	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 4. Pemimpin Divisi

			Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Konsumer 6. Pemimpin SKAI 7. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional
19	9 September 2017	Rapat Koordinasi Internal Pembagian Tugas Direktur Dana & Jasa dan Direktur Kredit & Syariah kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan
20	11 September 2017	Rapat Presentasi Progress Spin Off & Feasibility Study Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau Kepri	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi Syariah 5. Pemimpin Divisi MSDM 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan
21	18 September 2017	Rapat Presentasi Progress Pekerjaan Kajian Spin Off & Feasibility Study oleh Tim PT. Batasa Tazkia di Hadapan Direksi & Komisaris	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Dewan Komisaris 5. Pemimpin Divisi Syariah 6. Pemimpin Divisi MSDM 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan
22	18 September 2017	Rapat Pembahasan Penurunan NPL	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 4. Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
23	19 September 2017	1. Pembahasan Pengurus Bank, Remunerasi Pengurus dan Update Syariah 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Dewan Komisaris 5. Pemimpin Divisi MSDM
24	6 Oktober 2017	Pembahasan Kredit Sindikasi Kepada PT. Jasamarga Manado bitung dengan Totaal Partisipasi Bank Riau Kepri Sebesar Rp. 200 Milyar	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Komersial
25	6 Oktober 2017	Pembahasan Setoran Modal Pemprov. Riau Kepada PT. Bank Riau Kepri/PT. Bank Riau Kepri Syariah	1. DR. irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 4. Pemimpin Divisi

			Hukum 5. Pemimpin *Desk Corporate Secretary*
26	6 Oktober 2017	Pembahasan Progress Spin-off Syariah dan Opsi Penyertaan Modal	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Dewan Komisaris 5. Pemimpin Divisi MSDM 6. Pemimpin Divisi Syariah 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
27	13-15 Oktober 2017	Rapat Penyusunan Draft Kebijakan Umum Direksi dan Inisiatif Strategis Tahun 2018	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Unit Investigasi Fraud
28	20-21 Oktober 2017	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Seluruh Pemimpin Divisi 4. Pemimpin Kantor Bank
29	23 Oktober 2017	Rapat Pembahasan Potensial Risiko Hukum dan Risiko Reputasi Bank Riau Kepri	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
30	6 November 2017	Entry Meeting Audit Laporan Keuangan Tahun 2017 oleh KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Dewan Komisaris 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Syariah 7. Pemimpin Divisi Mikro Kecil dan Menengah 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
31	6 November 2017	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Unit Investigasi Fraud
32	7 November 2017	Membahas Pencapaian Laba Akhir Tahun 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Dewan Komisaris

			4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 6. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
33	13 November 2017	1. Progres Rencana Kerja Tahun 2017 2. Rencana Strategis Teknologi Informasi BRK 2018 – 2021 3. Kajian Pembelian Lisensi Bankvision	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 5. Pemimpin Divisi umum 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 8. Pemimpin Divisi Kepatuhan 9. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional 10. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
34	15 November 2017	Rapat Progress Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah BRK bersama Direksi	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Syariah
35	20 November 2017	Tindak Lanjut Temuan OJK Pemeriksaan Tahun 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin SKAI 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 7. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
36	12 Desember 2017	1. Dana Pembinaan Kemitraan Dari Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Yang Terpakai Dan Perlakukan Dalam Akuntansi 2. Perlakuan Atas Hapus Buku Kredit Yang Dilakukan Pada Tahun 2016 Sebesar Rp. 49 Miliyar Dan Konsekuensi Pajak Yang Harus Ditanggung Oleh Bank Riau Kepri 3. CKPN Hasil Proyeksi Perbaikan NPL Sebesar Rp. 11-13 Milyar Yang Baru Bsia Tuntas Di Akhir Desember 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin SKAI 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional
37	20 Desember 2017	Rapat NPF Unit Usaha Syariah BRK	1. DR. Irvandi Gustari

		bersama Direksi	2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah 4. Pemimpin Divisi Syariah
38	22 Desember 2017	Rapat Persiapan Penutupan Akhir Tahun 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Dewan Komisaris 5. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional 6. Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah 7. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 8. Pemimpin SKAI 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
39	28 Desember 2017	Persiapan Rencana PH Kredit Tahap III Tahun 2017	1. DR. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi dan pihak terkait, dan selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Tingkat kehadiran anggota Direksi secara fisik dalam rapat Direksi baik yang diselenggarakan internal Direksi maupun mengundang unit kerja terkait dan undangan Dewan Komisaris, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

No	Direksi	Jabatan	Kehadiran (dari total 39 kali rapat)		
			Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1	Irvandi Gustari	Direktur Utama	39	39	100 %
2	Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	39	31	80 %
3	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	39	24	62 %

Jumlah kehadiran rapat di atas, merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Divisi terkait. Di samping Direksi menyelenggarakan rapat sebagaimana diatur di atas, masing-masing Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan unit kerja di bawah supervisinya, sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR UTAMA		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	16 Januari 2017	Rapat Pembahasan Monitoring Penurunan NPL
2	20 Januari 2017	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Periode Desember 2016
3	2 Maret 2017	1. Pembahasan Surat OJK No. SR-23/KO.053/2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Saudara 2. Pembahasan Surat OJK No, SR-28/KO.053/2017 Perihal Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Umum Tahun 2016
4	4 April 2017	Tindak Lanjut Atas Permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. Permodalan Ekonomi Rakyat
5	5 April 2017	1. Evaluasi Pencapaian Kinerja UUS Triwulan I / Maret 2017 2. Progres Program Kerja Divisi Syariah 3. Progres *Spin Off Bank* Riau Kepri Syariah 4. Hal-hal Lain Yang dianggap Perlu
6	7 April 2017	Rapat Obligasi dan Saham Seri B
7	12 April 2017	Kebijakan Direksi tentang Pengelolaan Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri
8	18 Mei 2017	Persiapan Penerbitan Obligasi dan Penyertaan Modal PT. Jamkrida
9	19 Mei 2017	Perbaikan Kualitas *Tangible* Cabang Utama
10	5 Juni 2017	Pembahasan *Draft Annual Report* 2016
11	5 Juni 2017	Persiapan *Grand Launching* Laku Pandai PT. Bank Riau Kepri
12	9 Juni 2017	Rapat Temuan Penyelenggaraan Laku Pandai Hasil *On The Spot* (OTS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Layanan Laku Pandai PT. Bank Riau Kepri Bersama Otoritas Jasa Keuangan
13	12 Juni 2017	Pembahasan Tindak Lanjut Program GN Lingkaran
14	12 Juni 2017	Rapat Pembahasan Masalah NPL
15	22 Juni 2017	Rapat Pembahasan Monitoring Penurunan NPL
16	4 Juli 2017	Tindak Lanjut Temuan OJK
17	4 Juli 2017	Rapat SP2D *Online* Pemerintah Kota/Kabupaten Riau (SIMDA)
18	5 Juli 2017	Temuan Signifikan Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru
19	20 Juli 2017	MOU Aplikasi Kasda Online serta Integrasi Aplikasi Simda Online (Pemko. Dumai, Pemkab. Pelalawan, Pemkab. Rokan Hulu)
20	7 Juli 2017	Pembahasan Persiapan *Launching* dan Penandatanganan MoU Program GN Lingkaran
21	7 Juli 2017	Persiapan Acara Penjurian APBI
22	14 Juli 2017	Pembahasan Tindak Lanjut Pertemuan dengan Aspidsus Kejati Riau
23	13-14 Juli 2017	Evaluasi Kinerja Triwulan II 2017 PT. Bank Riau Kepri
24	14 Juli 2017	Rapat Pembahasan Surat OJK Provinsi Riau No. S-507/KO.053/2017 tgl. 11 Juli 2017 Perihal Teguran/Sanksi Laporan Pembukaan Layanan Kas
25	19 Juli 2017	Rapat Presentasi *Progress* Pekerjaan Kajian *Spin Off & Feasibility Study* oleh Divisi Syariah
26	25 Juli 2017	Rapat Pembahasan Perkiraan NPL sampai dengan Akhir bulan Juli 2017
27	25 Juli 2017	Kajian Penyertaan Modal dan Analisa Limit Non-Bank PT. Bank Riau Kepri
28	27 Juli 2017	Kinerja s.d. Juli 2017, LDR yang harus tercapai 100%, NPL, UMKM, dan Kinerja Lainnya yang Strategis
29	28 Juli 2017	Standarisasi *Furniture* dan Peralatan Pendukung Layanan Bank Riau Kepri
30	2 Agustus 2017	Pembahasan Permasalahan Pegawai
31	2 Agustus 2017	Persiapan *Spin off* UUS PT. Bank Riau Kepri
32	8 Agustus 2017	Temuan OJK Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2016 Komitmen s/d Desember 2017
33	8 Agustus 2017	Tindak Lanjut Study banding ke Maybank terkait dengan Pengembangan System IT dalam pengelolaan Pegawai
34	8 Agustus 2017	Pemaparan Hasil Gap Penilaian Bank *Service Excellence Monitor* (BSEM) Tahun 2017 oleh Marketing Research Indonesia (MRI) dan Persiapan Penilaian BSEM tahun 2018
35	14 Agustus 2017	Sosialisasi Hasil Penilaian Bank *Service Excellence Monitor* (BSEM) Tahun 2017 oleh Marketing Research Indonesia (MRI)
36	15 Agustus 2017	Rapat Koordinasi dengan Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri

37	15 Agustus 2017	Rapat Pembahasan Program CSR Kemitraan Pemerintah Kabupaten Kampar
38	18 Agustus 2017	Pembahasan Hak dan Fasilitas Direksi
39	22 Agustus 2017	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap Jaringan Kantor PT. Bank Riau Kepri Tahun 2017
40	30 Agustus 2017	Pembahasan *Broker* Asuransi
41	30 Agustus 2017	Persiapan Acara Penjurian IT Telco & Digital Award
42	31 Agustus 2017	Pembahasan Laporan Bulanan Auditor Cabang Jakarta
43	31 Agustus 2017	Hasil Audit Khusus Kedai Pasar Sail & Capem Tuanku Tambusai
44	4 September 2017	Pembahasan Program CSR Kemitraan Bank Riau Kepri dengan Pemprov Riau
45	8 September 2017	Pembahasan Kerahasiaan Data Divisi PKB dan Tim *Task Force* PKB
46	8 September 2017	Rapat Pembahasan Kinerja DSQ
47	11 September 2017	Rapat Penyelesaian Permasalahan ATM Cabang Tembilahan dan M-Banking PT. Bank Riau Kepri
48	11 September 2017	Pembahasan Evaluasi KC Pangkalan Kerinci
49	11 September 2017	Rapat Pembahasan Layanan VIP
50	11 September 2017	Rapat Presentasi *Progress Spin Off & Feasibility Study* Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau Kepri
51	18 September 2017	Rapat Presentasi *Progress* Pekerjaan Kajian *Spin Off & Feasibility Study* oleh Tim PT. Batasa Tazkia di Hadapan Direksi & Komisaris
52	18 September 2017	Rapat Koordinasi *Supervisor Funding Officer* dan Rencana Penyelenggaraan Sinar Tebar Milyar (STM) Bank Riau Kepri
53	18 September 2017	Pembahasan *Follow Up* kunjungan Ke Kuala Kampar, Teluk Meranti dan Tanjung Batu
54	18 September 2017	Pembahasan Permasalahan Cabang Pangkalan Kerici
55	18 September 2017	Rapat Pembahasan Penurunan NPL
56	19 September 2017	1. Pembahasan Pengurus Bank, Remunerasi Pengurus dan Update Syariah 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu
57	20 September 2017	Rapat Pembahasan Kebocoran Data ke Media Terkait Surat yang ditandatangan oleh Dirut Perihal Asuransi
58	25 Sptember 2017	Persiapan Rencana PH Kredit Tahap I Tahun 2017
59	3 Oktober 2017	Evaluasi Pencapaian Laba 30 September 2017 dan Rencana Aksi Pencapaian Laba Tahun 2017
60	3 Oktober 2017	Rencana Study Banding Layanan Samsat Non Tunai
61	6 Oktober 2017	Pembahasan Kredit Sindikasi Kepada PT. Jasamarga Manado Bitung dengan Total Partisipasi Bank Riau Kepri Sebesar Rp. 200 Milyar
62	6 Oktober 2017	Pembahasan Setoran Modal Pemprov. Riau Kepada PT. Bank Riau Kepri/PT. Bank Riau Kepri Syariah
63	6 Oktober 2017	Pembahasan *Progress Spin-off* Syariah dan Opsi Penyertaan Modal
64	9 Oktober 2017	Pembahasan *Pipeline* Kredit Komersial s.d Akhir Tahun Terkait Kredit Sindikasi
65	9 Oktober 2017	Penambahan Tenaga Kredit Analis Dalam Rangka Pencapaian Target Kredit di Divisi Komersial
66	13-15 Oktober 2017	Rapat Penyusunan Draft Kebijakan Umum Direksi dan Inisiatif Strategis Tahun 2018
67	17 Oktober 2017	Persiapan 4 (empat) Kantor Cabang *Icon* Dan Kunjungan Ke *Galery* ATM PT. Bank Riau Kepri
68	18 Oktober 2017	Perbaikan Menu ATM dan Pendaftar Mobile Banking di ATM Bank Riau Kepri
69	20-21 Oktober 2017	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III 2017
70	23 Oktober 2017	Rapat Pembahasan Potensial Risiko Hukum dan Risiko Reputasi Bank Riau Kepri
71	24 Oktober 2017	1. Pembahasan Progres Kajian Rencana Penyesuaian Eselonisasi Unit Kerja menjadi 4 Jabatan Pemimpin Bagian 2. Pembahasan Proposal Refreshment Bank Manajement For Executive Level
72	24 Oktober 2017	1. Pembahasan *Pending item* Divisi MSDM 2. Rencana Acara Pengarahan Direksi Terkait Evaluasi Kinerja Per September 2017 3. Rencana Acara Diklat Bagi Pegawai wilayah kepri di Batam

73	1 November 2017	Fasilitas Direktur Utama
74	6 November 2017	Pencapaian Kinerja Cabang Tahun 2017 Khususnya Kinerja Laba
75	6 November 2017	*Entry Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun 2017 oleh KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan
76	7 November 2017	Membahas Pencapaian Laba Akhir Tahun 2017
77	7 November 2017	Progres Tindak Lanjut Temuan Audit Umum Tahun 2016 Beserta Hasil Audit Umum Cabang Tanjung Balai Karimun Dan Cabang Siak 2017
78	7 November 2017	Tindak Lanjut Temuan Audit Umum Di KC Ranai Tahun 2017 Khususnya Kejadian Gangguan Operasional Kantor Kedai Serasaan Akibat Permasalahan Gangguan Sarana Komunikasi
79	8 November 2017	Hasil Audit Khusus Cabang Tanjung Balai Karimun dan Capem Syariah Duri Tahun 2017
80	8 November 2017	Progress Kerja *Desk Service Quality* (DSQ)
81	13 November 2017	1. Progres Rencana Kerja Tahun 2017 2. Rencana Strategis Teknologi Informasi BRK 2018 – 2021 3. Kajian Pembelian Lisensi Bank Vision
82	15 November 2017	Rapat *Progress* Persiapan *Spin Off* Unit Usaha Syariah BRK bersama Direksi
83	16 November 2017	Pembahasan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2018 PT. Bank Riau Kepri
84	20 November 2017	Tindak Lanjut Temuan OJK Pemeriksaan Tahun 2017
85	20 November 2017	Pengelolaan Dana Kemitraan/*Community Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Riau Kepri
86	22 November 2017	*Progress* Kerja *Desk Service Quality*
87	30 November 2017	ALCO agenda pembahasan : 1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) bulan November 2017 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bulan November 2017 (data posisi 31 Oktober 2017) 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
88	5 Desember 2017	Likuiditas Akhir Tahun
89	12 Desember 2017	1. Dana Pembinaan Kemitraan Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yang Terpakai dan Perlakukan dalam Akuntansi 2. Perlakuan Atas Hapus Buku Kredit Yang Dilakukan Pada Tahun 2016 Sebesar Rp. 49 Miliyar Dan Konsekuensi Pajak Yang Harus Ditanggung Oleh Bank Riau Kepri 3. CKPN Hasil Proyeksi Perbaikan NPL Sebesar Rp. 11-13 Milyar Yang Baru Bisa Tuntas di Akhir Desember 2017
90	13 Desember 2017	Proyeksi Kinerja Akhir Tahun 2017
91	19 Desember 2017	Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
92	19 Desember 2017	Tindak Lanjut *Review* BPP CSR Bank Riau Kepri
93	20 Desember 2017	Rapat NPF Unit Usaha Syariah BRK bersama Direksi
94	28 Desember 2017	Persiapan Rencana PH Kredit Tahap III Tahun 2017
95	22 Desember 2017	Rapat Persiapan Penutupan Akhir Tahun 2017
96	29 Desember 2017	Rapat Komite Kebijakan Preditan (KKP) tentang perubahan : 1. Usulan Perubahan SK Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Nomor 007/KEPDIR/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan Pencabutan SK dan Penetapan Penilaian (*scoring*) Limit Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Pemimpin Unit Kantor PT. Bank Riau Kepri Nomor 006/KEPDIR/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Penilaian (*Scoring*) Limit Wewenang Memutus Kredit dan Pmimpin Unit Kntor PT. Bank Riau kepri. 2. Usulan Perubanhan SK Nomor 58/KEPDIR/2017 tentang Kebijaksanaan Perkreditan Bank.

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR OPERASIONAL		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	3 Januari 2017	Rapat Koordinasi Divisi
2	20 Februari 2017	Pembahasan Implementasi NSCCIS
3	20 Maret 2017	Temuan OJK Hasil Pemeriksaan Tahun 2016
4	27 Maret 2017	Rapat Pembahasan Pengendalian NPL & Kredit Bermasalah
5	12 April 2017	Kebijakan Direksi tentang Pengelolaan Asuransi Kredit
6	6 Juni 2017	Pembahasan Broker Asuransi
7	25 Juli 2017	Pembahasan Mengenai Jasa Penagihan bagi Tenaga Penagihan Kredit Konsumtif
8	7 Agustus 2017	Pembahasan Broker Asuransi Setelah Pertemuan Dengan BPKP
9	30 Agustus 2017	Pembahasan Broker Asuransi
	11 September 2017	Rapat Presentasi *Progress Spin Off & Feasibility Study* Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau Kepri
10	18 September 2017	Rapat Pembahasan Penurunan NPL
11	18 September 2017	Rapat Presentasi *Progress* Pekerjaan Kajian *Spin Off & Feasibility Study* oleh Tim PT. Batasa Tazkia di Hadapan Direksi & Komisaris
12	19 September 2017	1. Pembahasan Pengurus Bank, Remunerasi Pengurus dan Update Syariah 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu
13	6 Oktober 2017	Pembahasan *Progress Spin-off* Syariah dan Opsi Penyertaan Modal
14	13-15 Oktober 2017	Rapat Penyusunan Draft Kebijakan Umum Direksi dan Inisiatif Strategis Tahun 2018
15	16 Oktober 2017	Penyusunan *Roadmap* Implementasi PSAK 72 (IFRS 9)
16	20-21 Oktober 2017	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III 2017
17	6 November 2017	*Entry Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun 2017 oleh KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan
18	13 November 2017	1. Progress Rencana Kerja Tahun 2017 2. Rencana Strategis Teknologi Informasi BRK 2018 – 2021 3. Kajian Pembelian Lisensi Bank Vision
19	11 Desember 2017	Evaluasi Kinerja ATM Bank Riau Kepri
20	12 Desember 2017	1. Dana Pembinaan Kemitraan Dari Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Yang Terpakai Dan Perlakukan Dalam Akuntansi 2. Perlakuan Atas Hapus Buku Kredit Yang Dilakukan Pada Tahun 2016 Sebesar Rp. 49 Miliyar Dan Konsekuensi Pajak Yang Harus Ditanggung Oleh Bank Riau Kepri 3. CKPN Hasil Proyeksi Perbaikan NPL Sebesar Rp. 11-13 Milyar Yang Baru Bsia Tuntas Di Akhir Desember 2017
21	20 Desember 2017	Rapat NPF Unit Usaha Syariah BRK bersama Direksi
22	22 Desember 2017	Rapat Persiapan Penutupan Akhir Tahun 2017
23	28 Desember 2017	Persiapan Rencana PH Kredit Tahap III Tahun 2017
24	28 Desember 2017	Persiapan Rencana PH Kredit Thaap III Tahun 2017

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	5 Januari 2017	Agenda Rapat Terkait Rencana Acara Rapat Kerja RBB Tahun 2017
2	6 Januari 2017	Pembahasan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2016 yang Telah Jatuh Tempo Desember 2016
3	10 Januari 2017	Pembahasan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2016 yang Telah Jatuh Tempo Desember 2016
4	20 Januari 2017	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Periode Desember 2016
5	2 Maret 2017	1. Pembahasan Surat OJK No. SR-23/KO.053/2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Saudara

		2. Pembahasan Surat OJK No, SR-28/KO.053/2017 Perihal Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Umum Tahun 2016
6	9 Juni 2017	Rapat Temuan Penyelenggaraan Laku Pandai Hasil *On The Spot* (OTS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Layanan Laku Pandai PT. Bank Riau Kepri Bersama Otoritas Jasa Keuangan
7	4 Juli 2017	Tindak Lanjut Temuan OJK
8	7 Juli 2017	Tindak Lanjut Temuan OJK
9	13-14 Juli 2017	Evaluasi Kinerja Triwulan II 2017 PT. Bank Riau Kepri
10	14 Juli 2017	Pembahasan Tindak Lanjut Pertemuan dengan Aspidsus Kejati Riau
11	14 Juli 2017	Rapat Pembahasan Surat OJK Provinsi Riau No. S-507/KO.053/2017 tanggal 11 Juli 2017 Perihal Teguran/Sanksi Laporan Pembukaan Layanan Kas
12	26 Juli 2017	Membahas Tingkat Kesehatan Bank Juni 2017
13	8 Agustus 2017	Temuan OJK Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2016 Komitmen s/d Desember 2017
14	22 Agustus 2017	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap Jaringan Kantor PT. Bank Riau Kepri Tahun 2017
15	30 Agustus 2017	Pembahasan Broker Asuransi
16	31 Agustus 2017	Pembahasan Laporan Bulanan Auditor Cabang Jakarta
17	9 September 2017	Rapat Koordinasi Internal Pembagian Tugas Direktur Dana & Jasa dan Direktur Kredit & Syariah kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional
18	11 September 2017	Rapat Presentasi *Progress Spin Off & Feasibility Study* Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau Kepri
19	19 September 2017	1. Pembahasan Pengurus Bank, Remunerasi Pengurus dan Update Syariah 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu
20	18 September 2017	Rapat Presentasi Progress Pekerjaan Kajian *Spin Off & Feasibility Study* oleh Tim PT. Batasa Tazkia di Hadapan Direksi & Komisaris
21	6 Oktober 2017	Pembahasan *Progress Spin-off* Syariah dan Opsi Penyertaan Modal
22	6 Oktober 2017	Pembahasan Setoran Modal Pemprov. Riau Kepada PT. Bank Riau Kepri/PT. Bank Riau Kepri Syariah
23	23 Oktober 2017	Rapat Pembahasan Potensial Risiko Hukum dan Risiko Reputasi Bank Riau Kepri
24	6 November 2017	*Entry Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun 2017 oleh KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan
25	6 November 2017	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2017
26	7 November 2017	Membahas Pencapaian Laba Akhir Tahun 2017
27	13 November 2017	1. *Progress* Rencana Kerja Tahun 2017 2. Rencana Stratgegis Teknologi Informasi BRK 2018 – 2021 3. Kajian Pembelian Lisensi Bank Vision
28	15 November 2017	Rapat Progress Persiapan *Spin Off* Unit Usaha Syariah BRK bersama Direksi
29	20 November 2017	Tindak Lanjut Temuan OJK Pemeriksaan Tahun 2017
30	22 November 2017	Tindak Lanjut Temuan OJK Pemeriksaan Tahun 2017 terkait *Market Conduct*
31	22 Desember 2017	Rapat Persiapan Penutupan Akhir Tahun 2017

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Bank dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment)* Tata Kelola yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure, governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola sesuai dengan Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip TARIF dalam Tata Kelola yang Baik terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment)*, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini terlihat pada saat pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2017 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui laporan tahunan tahun buku 2016 yaitu laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2016 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016.

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi

Sepanjang tahun 2017 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp16.976.393.062,-

Jumlah di atas merupakan remunerasi yang diberikan kepada Direksi untuk periode Januari s/d Desember 2017.

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2017, sebagai berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Direksi	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	5*	16.615.474.378,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	360.918.684,-
Jumlah Penerimaan		**16.976.393.062,-**

Keterangan :

* Sepanjang tahun 2017 jumlah Direksi Bank adalah tiga orang, namun untuk pembayaran tantiem tahun 2016 selain dibayarkan kepada tiga orang Direksi Bank, juga dibayarkan kepada dua orang Direksi yaitu Nizam yang masa jabatannya sebagai Direktur Dana dan Jasa berakhir per 31 Agustus 2016 dan Afrial Abdullah yang masa jabatannya sebagai Direktur Kredit dan Syariah berakhir per 13 September 2016.

Rincian Remunerasi Direksi selama tahun 2017 terlihat dalam tabel berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi
1	Gaji	2.620.800.000
2	Pakaian Dinas	89.100.000
3	Cuti	358.800.000
4	THR	655.200.000
5	Tunjangan Perumahan	115.500.000

6	Tunjangan Listrik	95.740.101
7	Tunjangan Telepon	117.280.542
8	Tunjangan Kesehatan	147.898.041
9	Tunjangan Hari Tua	498.512.971
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	2.274.031.071
11	Tunjangan Pajak	2.481.687.400
12	Tantiem	7.521.842.936
Total		**16.976.393.062**

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2017 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah ini :

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	3
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	1*
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1**
Rp 500 juta ke bawah	-
Total	**5*** **

Keterangan :

* Untuk kelompok nominal remunerasi di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar adalah Direktur Kredit dan Syariah (Afrial Abdullah) yang masa jabatannya berakhir per 13 September 2016.

** Untuk kelompok nominal remunerasi di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar adalah Direktur Dana dan Jasa (Nizam) yang masa jabatannya berakhir per 31 Agustus 2016.

*** Sepanjang tahun 2017 jumlah Direksi Bank adalah tiga orang, namun untuk pembayaran tantiem tahun 2016 selain dibayarkan kepada tiga orang Direksi Bank, juga dibayarkan kepada dua orang Direksi yaitu Nizam yang masa jabatannya sebagai Direktur Dana dan Jasa berakhir per 31 Agustus 2016 dan Afrial Abdullah yang masa jabatannya sebagai Direktur Kredit dan Syariah berakhir per 13 September 2016.

Program Pelatihan dan Seminar Direksi

Sepanjang tahun 2017, Direksi Bank telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/*workshop* yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal yaitu BI/OJK dan dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia, antara lain :

Nama	Materi Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan/Seminar	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Irvandi Gustari	*Workshop* Penerbitan Obligasi	Divisi MSDM	Pekanbaru, 24 Februari 2017
	Sosialisasi mengenai Ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valas bagi Bank Umum Konvensional	Bank Indonesia	Jakarta, 5 Mei 2017
	Workshop Development Of Corporate Level BSC	Divisi Perencanaan Strategis	Batam, 10 Juli 2017

	Workshop Pengelolaan Dana Haji oleh Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji	Asbanda	Yogyakarta, 15 September 2017
	Seminar Indonesia *Banking Expo* 2017	Perbanas	Jakarta, 19 September 2017
	Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai oleh Pemerintah Daerah	Asbanda	Jakarta, 5 Oktober 2017
	Sosialisasi Transaksi Non Tunai Di Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau	Divisi Produk Dana dan Jasa	Batam, 27 Oktober 2017
	Sosialisasi Regulasi Terkait BUMD	Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI	Jakarta, 13 Desember 2017
Denny Muliya Akbar	Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat Eksekutif	Sentramark Business Management	Jakarta, 26 Januari 2017
	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, 14 Februari 2017
	Workshop Penerbitan Obligasi	Divisi MSDM	Batam, 24 Februari 2017
	Sosialisasi Kesiapan Penerapan PSAK 71 (IFRS 9)	Asbanda	Yogyakarta, 17 April 2017
	Solusi Inovatif Perbankan Digital Masa Depan	Infobank	Jakarta, 27 April 2017
	Workshop Development Of Corporate Level BSC	Divisi Perencanaan Strategis	Batam, 10 Juli 2017
	Workshop Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang *Treasury*	Otoritas Jasa Keuangan	Palembang, 27 Juli 2017
	Sosialisasi Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pemda	Asbanda	Jakarta, 11 Agustus 2017
	Expand Leadership Program For BOD/BOC	CLDI	Bali, 2 Agustus 2017
	4th *Asian Fixed Income Summit*	PT. SMF	Bali, 7 September 2017
	Seminar IBEX 2017	Asbanda	Jakarta, 18 September 2017
	Training Electronic Banking Manajemen Sistem Informasi dan	Infobank	Bandung, 26 September 2017

	Operasional Perbankan: Optimalisasi *Digital Banking* Dalam Rangka Meningkatkan *Fee Based Income* dan *Financial Inclusion*		
	Seminar Persiapan Penerapan PSAK 71	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, 5 Oktober 2017
	PSAK 71: *Forward Looking Adjustment* dan *Expected Credit Loss*	One Point Indonesia	Jakarta, 23 Oktober 2017
	Sosialisasi Transaksi Non Tunai Di Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau	Divisi Produk Dana dan Jasa	Batam, 27 Oktober 2017
	Workshop Data *Quality Assurance* Sistem Informasi Debitur (SID) untuk Direksi BPD di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan BI Solo	Bank Indonesia	Solo, 21 November 2017
Eka Afriadi	Sosialisasi Pelaksanaan Operasi Moneter serta luncheon *Meeting* Terkait Pentingnya Pengelolaan Likuiditas dan Transaksi Repo	Bank Indonesia	Jakarta, 30 Januari 2017
	Workshop Penerbitan Obligasi	Divisi MSDM	Batam, 24 Februari 2017
	Workshop Manajemen Pengawasan Dana Pensiun	ADPI	Jakarta, 21 Maret 2017
	Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	Batam, 5 April 2017
	Seminar *Indonesian & Global Economic Outlook*	Bank Panin	Australia, 11 Mei 2017
	Sosialisasi Peraturan BI No. 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional	Bank Indonesia	Jakarta, 22 Mei 2017

	Seminar FKDKP untuk level Pengurus Bank di Jakarta	FKDKP	Jakarta, 24 Mei 2017
	Workshop Development Of Corporate Level BSC	Divisi Perencanaan Strategis	Batam, 10 Juli 2017
	Workshop & Discussion How To Build Risk & Control Culture	ILC Learning Center	Jakarta, 14 Agustus 2017
	Workshop GCG, Risk dan Compliance	Asbanda	Jakarta, 7 September 2017
	Training dalam Rangka Penyusunan Kepdir PT Bank Riau Kepri tentang Aspek Hukum Lelang yang tidak bisa Menutupi Sisa Hutang	Divisi Hukum	Batam, 7 September 2017
	Seminar *Indonesia Banking Expo* 2017	Perbanas	Jakarta, 19 September 2017
	Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPDSI	Asbanda	Banyuwangi, 16 November 2017
	Sosialisasi Pokok-Pokok Peraturan Bank Indonesia Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia	Bank Indonesia	Jakarta, 27 November 2017
	Sosialisasi Ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)	Bank Indonesia	Jakarta, 30 November 2017
	Seminar Arah Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan	FKDKP	Jakarta, 7 Desember 2017

	Sosialisasi Regulasi Terkait BUMD	Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI	Jakarta, 13 Desember 2017
	BPD *Workshop* Tahun 2017	Bank Mandiri	Singapura, 16 Desember 2017

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
   a. Dasar Hukum
   b. Istilah Yang Digunakan
2. Direksi, meliputi :
   a. Visi Dan Misi
   b. Tujuan
   c. Fungsi
   d. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
   e. Persyaratan Untuk Menjadi Direksi
   f. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
   g. Masa Jabatan
   h. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
   i. Etika Kerja dan Jabatan
   j. Waktu Kerja
   k. Tugas dan Tanggung jawab
   l. Hak dan Kewenangan
   m. Rapat Direksi
   n. Pembagian Tugas Antar Direksi
   o. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
   p. Komite-komite Direksi
   q. Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris
   r. Penggunaan Saran Profesional

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jabatan	Gaji (Rp)		Rasio Perbandingan (%)
		Tertinggi	Terendah	
1	Gaji Dewan Komisaris	62.400.000,-	56.160.000,-	90
2	Gaji Direksi	78.000.000,-	70.200.000,-	90
3	Gaji Pegawai Tetap	32.200.000,-	3.560.000,-	11,06
4	Gaji Pegawai Tidak Tetap	4.812.500,-	2.025.000,-	42,08
5	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	78.000.000,-	32.200.000,-	41,28

Komposisi Pegawai

Sampai dengan Desember 2017 jumlah pegawai Bank Riau Kepri (pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap) berjumlah 1.986 orang.

Komposisi pegawai sebagaimana diuraikan di bawah ini merupakan uraian komposisi pegawai Bank Riau Kepri dengan status pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

1. Komposisi Pegawai Tetap (PT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan tingkat usia pada tahun 2017

No	Usia Pegawai	(PT)	(PTT)	Jumlah
1	50 – 55	76	6	82
2	40 – 49	205	52	257
3	30 – 39	724	216	940
4	23 – 29	348	330	678
5	≤ 23	2	27	29
Total		**1.355**	**631**	**1.986**

2. Komposisi Pegawai Tetap berdasarkan jabatan pada tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi	17
2	Staf Direksi	0
3	Pemimpin Bagian Kantor Pusat	37
4	Pemimpin Cabang Konvensional	18
5	Pemimpin Cabang Syariah	2

6	Setingkat Pemimpin Cabang Utama	1
7	Pemimpin Cabang Pembantu	42
8	Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat	2
9	Pemimpin Setingkat Pincapem	11
10	Pemimpin Seksi Setingkat	303
11	Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	3
12	Pelaksana	874
13	Supir	15
14	Satpam	30
Total		**1.355**

3. Komposisi Pegawai Tidak Tetap berdasarkan jabatan pada tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah
1	Pegawai Administrasi	29
2	Teller/CS/Pemasar	267
3	Supir	51
4	Satpam	198
5	Operator Telepon	1
6	Operator Genset	0
7	Petugas Ekspedisi	4
8	Pembantu Rumah Tangga	1
9	Petugas Jaga Malam	9
10	Petugas Kebersihan	71
Total		**631**

4. Komposisi Pegawai (tetap dan tidak tetap) berdasarkan pendidikan pada tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Doktor	2
2	Pasca Sarjana	79
3	Sarjana	1.300
4	Diploma (D1 & D3)	258
5	SLTA	333
6	SLTP	13
7	SD	1
Total		**1.986**

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Struktur organisasi tersebut dibentuk sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

KOMITE AUDIT

Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Untuk komposisi Komite Audit sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK Direksi Nomor 59/KEPDIR/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 19/KEPDIR/2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, komposisi Komite Audit sampai dengan bulan Mei tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Audit Berdasarkan SK Direksi No. 59/KEPDIR/2016		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
A. Rivaie Rachman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

2. Dengan ditetapkannya Taufiqurrahman sebagai Komisaris Independen, maka ketua Komite Audit (merangkap anggota) selanjutnya dijabat oleh Taufiqurrahman yang ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit per Mei 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor 037A/KEPDIR/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 59/KEPDIR/2016 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 19/KEPDIR/2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, sehingga komposisi Komite Audit adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Audit Berdasarkan SK Direksi Nomor 037A/KEPDIR/2017		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Taufiqurrahman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank terdiri dari Komisaris independen dan pihak independen. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Anggota Komite Audit Bank telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat secara profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dibidang laporan keuangan dari Direksi, auditor internal, auditor eksternal, serta mereview laporan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diatur di dalam SOT Bank Riau Kepri antara lain adalah :

1. Menindaklanjuti hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.
2. Melaporkan pelaksanaan dari pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada OJK setiap semester.
3. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh SKAI dan meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
4. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin SKAI oleh Direksi dan dilaporan kepada OJK.

6. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk.
7. Menyampaikan hasil pemeriksaan yang bersifat material dan rekomendasi perbaikan atau saran yang bersifat material ke Bursa Efek dan tersedia di kantor perusahaan untuk dibaca oleh Pemegang Saham.
8. Menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.
10. Mengevaluasi kebijakan pengendalian risiko.
11. Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan penanganan khusus.
12. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Audit

1. Rencana Kegiatan/Program Kerja Komite Audit

Untuk tahun 2017 Komite Audit telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan rapat rutin Komite Audit untuk membahas Laporan Hasil Audit Umum.
b. Melakukan *review* realisasi Rencana Kerja Audit Tahunan SKAI.
c. Melakukan rapat Komite Audit dengan Auditor Indenden/KAP.
d. Melakukan rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
e. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
f. Melakukan kunjungan pengawasan ke Kantor Cabang.
g. Melakukan rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
h. Melakukan pembahasan laporan keuangan dan laporan realisasi Rencana Bisnis Bank serta laporan kinerja Bank.
i. Membuat laporan tahunan Komite Audit.

2. Realisasi Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan

rencana kerja dan tugas serta tanggung jawabnya, meliputi sebagai berikut :

a. Melakukan rapat rutin Komite Audit untuk membahas Laporan Hasil Audit Umum.
b. Melakukan *review* realisasi Rencana Kerja Audit Tahunan SKAI.
c. Melakukan rapat Komite Audit dengan Auditor Independen/KAP.
d. Melakukan rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
e. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
f. Melakukan rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
g. Melakukan pembahasan laporan keuangan dan laporan realisasi Rencana Bisnis Bank serta laporan kinerja Bank.
h. Membuat laporan tahunan Komite Audit.

Aktivitas Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2017 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran–saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank di dalam 29 (dua puluh sembilan) kali rapat/pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit secara internal sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali rapat/pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	7 Februari 2017	1. Membahas kemajuan/progress audit KAP atas laporan keuangan tahun 2016; 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
2	14 Februari 2017	1. Membahas laporan kinerja Bank Riau Kepri per 31 Desember 2016; 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. H. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	20 Februari 2017	1. Membahas hasil final audit KAP atas laporan keuangan tahun 2016; 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. H.R.Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
4	3 Maret 2017	1. Membahas tentang laporan perkembangan kinerja dan keuangan (Quick Monthly Report summary) PT. Bank Riau Kepri bulan Januari 2017;	1. H.R.Mambang Mit 2. H. A. Rivaie Rahman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

		2. Membahas Hal-hal Lain yang dianggap Perlu.	
5	25 April 2017	1. Membahas tentang kepengurusan komite pada PT. Bank Riau Kepri; 2. Membahas tindak lanjut dari Keputusan RUPS tahunan PT. Bank Riau Kepri, jumat, 3 Maret 2017, dan keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri, sabtu tanggal 4 Maret 2017.	1. H.A Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
6	2 Mei 2017	1. Membahas POJK Nomor 13/POJK.03/2017 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
7	16 Mei 2017	1. Membahas laporan kinerja Bank Riau Kepri Triwulan I-2017; 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. H. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
8	26 Mei 2017	1. Membahas laporan SKAI mengenai tindak lanjut Audit Umum Perkreditan, Audit Umum Operasional dan IT tahun 2016 periode April 2017; 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
9	9 Juni 2017	1. Membahas Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2016; 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
10	15 Juni 2017	1. Membahas tentang laporan hasil audit umum PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pasar Pusat; 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
11	28 Juli 2017	1. Membahas tentang Sosialisasi Kesiapan Penerapan PSAK 71 (IFRS 9) 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
12	10 Agustus 2017	1. Membahas tentang LHP OJK mengenai Risiko Likuiditas 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
13	15 Agustus 2017	1. Membahas Laporan SKAI mengenai tindak lanjut Audit Umum Perkreditan, Audit Umum Operasional dan IT tahun 2016 periode Juni 2017 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
14	21 Agustus 2017	1. Membahas Laporan SKAI mengenai tindak lanjut Audit Umum Cabang Syariah Periode Audit 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2017. 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

15	28 Agustus 2017	1. Membahas tentang kunjungan pengawasan ke Capem Dalu-dalu untuk mendapatkan informasi yang terupdate tentang kondisi NPL dan mencari akar permasalahan dari kredit bermasalah serta membahas kemungkinan solusi dari permasalahan tersebut. 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
16	28 Agustus 2017	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Pasir Pengaraian Periode 1 April 2016 s/d 31 Maret 2017 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
17	29 Agustus 2017	5. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri s.d Juni 2017 6. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
18	26 September 2017	1. Membahas tentang penawaran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri untuk Tahun Buku 2017 2. Memberikan kemungkinan alternative pemilihan KAP yang akan dipilih untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri untuk Tahun Buku 2017 3. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
19	3 Oktober 2017	1. Membahas tentang hasil mapping dari penawaran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri tahun buku 2017 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
20	6 November 2017	1. Membahas jadwal dan pelaksanaan Audit KAP atas laporan keuangan tahun 2017 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
21	9 November 2017	1. Membahas tentang kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) hingga Oktober 2017 2. Membahas hasil tindak lanjut dari temuan intern dan ekstern 3. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
22	8 Desember 2017	1. Membahas Laporan Auditor Independen KAP atas laporan keuangan tahun 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
23	11 Desember 2017	1. Membahas Laporan Kinerja Bank	1. Taufiqurrahman

		Riau Kespi s.d Oktober 2017 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

Untuk rapat koordinasi Komite Audit dengan unit kerja Bank lainnya dan pihak eksternal (KAP) telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali rapat/pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	9 Januari 2017	1. Membahas tindak lanjut temuan-temuan OJK, BPK; 2. Evaluasi kinerja tahun 2016 dan rencana kerja tahun 2017; 3. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. H. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan
2	20 Januari 2017	1. Membahas tindak lanjut hasil temuan-temuan audit SKAI; 2. Evaluasi kinerja tahun 2016 dan program kerja tahun 2017; 3. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu .	1. H. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin SKAI
3	8 Februari 2017	1. Membahas evaluasi kinerja bank riau kepri tahun 2016; 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. H.R.Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Direktur Utama 7. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 8. Direktur Operasional 9. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional 10. Pemimpin Divisi Kepatuhan
4	22 Februari 2017	1. Membahas hasil Exist Meeting Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri per 31 Desember 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R.Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Direktur Utama 6. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 7. Direktur Operasional 8. Pemimpin SKAI 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan 10. Pemimpin Divisi Hukum 11. Pemimpin Divisi Komersial 12. Pemimpin Divisi Umum 13. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional 14. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

			15. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
5	6 Oktober 2017	1. Membahas tentang hasil evaluasi presentasi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk penawaran biaya pengadaan dan Jasa Audit Laporan Keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2017. 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Kantor Akuntan Publik
6	12 Desember 2017	1. Membahas tentang Draft Piagam Audit Intern PT. Bank Riau Kepri 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin SKAI

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran Pada :			(%) Kehadiran
	Rapat Internal Komite	Rapat Koordinasi	Total Jumlah Kehadiran	
H. R. Mambang Mit	23	6	29	100%
H. Rivaie Rachman*	7	4	11	100%
Taufiqurrahman**	16	2	18	100%
Fahmi Oemar	23	6	29	100%
Indarti	23	6	29	100%

** Menjabat sebagai Ketua Komite Audit merangkap anggota s.d. Mei 2017*
*** Menjabat sebagai Ketua Komite Audit merangkap anggota per Mei 2017*

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko dibentuk bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu

menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Untuk komposisi Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK Direksi Nomor 59/KEPDIR/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 19/KEPDIR/2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, komposisi Komite Pemantau Risiko sampai dengan bulan Mei tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Berdasarkan SK Direksi No. 59/KEPDIR/2016		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Mambang Mit	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Utama
A. Rivaie Rachman	Anggota	Komisaris Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

2. Dengan ditetapkannya Taufiqurrahman sebagai Komisaris Independen, maka ketua Komite Pemantau Risiko (merangkap anggota) selanjutnya dijabat oleh Taufiqurrahman yang ditetapkan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko per Mei 2017 berdasarkan SK Direksi Nomor 037A/KEPDIR/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 59/KEPDIR/2016 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 19/KEPDIR/2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, sehingga komposisi Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Berdasarkan SK Direksi Nomor 037A/KEPDIR/2017		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Taufiqurrahman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
A. Rivaie Rachman	Anggota	Komisaris Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu–isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah–langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri adalah :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan tidak terbatas pada laporan pemeriksaan SKAI dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
10. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

Rencana dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

1. Rencana Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Untuk tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas mengenai informasi-informasi yang terkait dengan profil risiko diluar dari laporan reguler dari Divisi Manajemen Risiko.

b. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas laporan profil risiko Bank atau materi lain yang dipandang perlu.

c. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Bank.

d. Melakukan kunjungan pengawasan Pemantau Risiko ke Kantor Cabang.

e. Melaksanakan rapat lainnya yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

f. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

2. Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2017 kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas mengenai informasi-informasi yang terkait dengan profil risiko diluar dari laporan reguler dari Divisi Manajemen Risiko.

b. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas laporan profil risiko Bank atau materi lain yang dipandang perlu.

c. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Bank.

d. Melaksanakan rapat lainnya yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

e. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran–saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank di dalam 18 (delapan belas) kali rapat/pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Pemantau Risiko secara internal sebanyak 15 (lima belas) kali rapat/pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	16 Februari 2017	1. Membahas penerapan manajemen risiko PT. Bank Riau Kepri; 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
2	02 Maret 2017	1. Membahas tentang laporan perkembangan kinerja dan keuangan (Quick Monthly Report Summary) PT. Bank Riau Kepri bulan Januari 2017; 2. Membahas potensi risiko dan upaya meminilisasikan risiko; 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	20 April 2017	1. Membahas tindak lanjut informasi di *Management Letter* dari Audit Eksternal atas laporan keuangan PT. Bank Riau Kepri untuk tahun buku 2016; 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. H. R. Mambang Mit 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
4	28 April 2017	1. Membahas pembiayaan kredit sindikasi PT. Perkebunan Nusantara V (Persero); 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
5	8 Mei 2017	1. Membahas tentang laporan perkembangan kinerja dan keuangan (Quick Monthly Report Summary) PT. Bank Riau Kepri bulan Maret 2017; 2. Membahas potensi risiko dan upaya mengatasi risiko 3. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
6	29 Mei 2017	1. Membahas laporan Direktur Kepatuhan Triwulan I 2017; 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
7	30 Mei 2017	1. Membahas tentang permohonan persetujuan penanganan kredit bermasalah Bank Riau Kepri dari Direksi ke Dewan Komisaris;	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

		2. Membahas penjelasan poin-poin perubahan pada permohonan persetujuan pedoman penanganan kredit bermasalah pada Bank Riau Kepri; 3. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	
8	12 Juni 2017	1. Membahas tentang laporan hasil audit umum PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pasar Pusat; 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
9	31 Juli 2017	1. Membahas tentang Complain Nasabah terkait dengan pemasalahan transaksi m-banking dan transaksi ATM yang tidak dapat dioperasinalkan 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
10	16 Agustus 2017	1. Membahas tentang Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri untuk Bulan Juni 2017 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
11	6 September 2017	1. Membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pengembangan Bank 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
12	11 September 2017	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Pasir Pengaraian Periuode Audit 01 April 2016 s/d 31 Maret 2017. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
13	24 Oktober 2017	1. Membahas tentang target NPL (Non Performing Loan) Bank Riau Kepri 2. Membahas Langkah-langkah penyelesaian kredit 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
14	7 November 2017	1. Membahas Laporan Hasil Penilaian Profil Risiko per 30/09/2017 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
15	21 Desember 2017	1. Membahas tentang Laporan konfirmasi hasil pemeriksaan OJK mengenai temuan Pemeriksaan pada PT. Bank Riau Kepri	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

		2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	

Untuk rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan unit kerja Bank lainnya telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	9 Januari 2017	1. Membahas tindak lanjut hasil temuan BPK dan OJK pada PT. Bank Riau Kepri tahun 2016; 2. Membahas rencana kerja Divisi Kepatuhan tahun 2017; 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan
2	19 Januari 2017	1. Membahas laporan penilaian tingkat kesehatan bank periode Desember 2016; 2. Membahas hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.	1. H.R. Mambang Mit 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan
3	28 Juli 2017	1. Membahas Laporan Tingkat Kesehatan Bank periode Juni 2017 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Taufiqurrahman 2. H. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran Pada :			% Kehadiran
	Rapat Internal Komite	Rapat Koordinasi	Total Jumlah Kehadiran	
H. Rivaie Rachman	15	3	18	100 %
H. R. Mambang Mit*	5	2	7	100 %
Taufiqurrahman**	10	1	11	100 %
Fahmi Oemar	15	3	18	100 %
Indarti	15	3	18	100 %

** Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap anggota s.d. Mei 2017*
*** Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap anggota per Mei 2017*

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari Komisaris independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia). Untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia) memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank, dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Untuk komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Remunerasi dan Nominasi Berdasarkan SK Direksi Nomor 037A/KEPDIR/2017		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
A. Rivaie Rachman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Yuharman	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris,

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan bidang remunerasi :
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
      - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
   c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
      - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
      - Prestasi kerja individual
      - Kewajaran dengan *peer group*
      - Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank
2. Terkait dengan bidang nominasi :
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Rencana Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

a. Mereview sistem serta prosedur pemilihan/pergantian dan calon Direksi atau Komisaris PT. Bank Riau Kepri.
b. Mereview kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
c. Mereview kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif.
d. Mengadakan rapat untuk membahas perpanjangan anggota Komite.

e. Menyusun nominasi dalam rangka kaderisasi calon pengurus Bank Riau Kepri.

f. Mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris.

g. Mengadakan rapat dengan Direksi dan Satuan Kerja (MSDM).

h. Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

2. Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2017 program kerja yang telah dilaksanakan/direalisasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain sebagai berikut :

a. Mereview kebijakan remunerasi Dewan Komisaris/Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Mereview kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif

c. Mengadakan rapat untuk membahas perpanjangan anggota Komite.

d. Menyusun nominasi pejabat-pejabat eksekutif dalam rangka kaderisasi calon pengurus Bank Riau Kepri.

e. Menyusun rekomendasi calon Komisaris dan calon Direksi Bank untuk disampaikan kepada RUPS.

f. Mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris.

g. Mengadakan rapat dengan Direksi.

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Sesuai ketentuan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sepanjang tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah melakukan pembahasan dalam bentuk pertemuan/rapat sebanyak 8 (delapan) kali rapat/pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	05 Januari 2017	Membahas masa kerja anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
2	10 Januari 2017	Membahas masalah proses pencalonan calon Direksi PT. Bank Riau Kepri dan pembahasan POJK No. 27/POJK.03/2016	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman

		tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.	4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan
3	19 Januari 2017	Membahas masalah Progress Proses Pencalonan Calon Direksi PT. Bank Riau Kepri.	1. H.R. Mambang Mit 2. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan
4	20 Februari 2017	1. Usulan Remunerasi Pengurus PT. Bank Riau Kepri. 2. Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri.	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Yuharman
5	29 Mei 2017	Membahas masalah permohonan persetujuan calon Direksi PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H. R. Mambang Mit 3. Yuharman
6	12 Oktober 2017	Membahas masalah tindak lanjut pencalonan calon Direksi PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H. R. Mambang Mit 3. Yuharman
7	13 November 2017	Membahas penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap calon Direktur Kredit dan Syariah	1. A. Rivaie Rachman 2. H. R. Mambang Mit 3. Yuharman
8	29 Desember 2017	Membahas Remunerasi Pengurus PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H. R. Mambang Mit 3. Yuharman

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota komite.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
A. Rivaie Rachman	7	88 %
H. R. Mambang Mit	8	100 %
Yuharman	7	88 %

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF YANG DIMILIKI OLEH BANK

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi telah membentuk komite eksekutif yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, yang terdiri dari : Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Kredit, Komite Anti *Fraud* dan Komite Sumber Daya Manusia.

1. Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 06/KEPDIR/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi PT. Bank Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI	
Direktur Utama	Ketua
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Operasional	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Direktur Dana & Jasa	Anggota
Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
Pemimpin Divisi Operasional dan Keuangan	Anggota
Pemimpin Divisi Produk, Dana dan Jasa	Anggota
Pemimpin Divisi Umum	Anggota
Pemimpin Divisi Human Capital	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup :

a. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.

b. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi.

c. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi dan menetapkan status prioritas Teknologi Informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank).

d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati di dalam *Service Level Agreement*, melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.

e. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.

f. Efektifitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.

g. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.

h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.

i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2017 Komite Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini :

RAPAT KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2017	
Tanggal	**Agenda**
Senin, 13 November 2017	1. Progress Rencan Kerja tahun 2017 2. Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank Riau Kepri tahun 2018 – 2021 3. Kajian Pembelian Lisensi Bank Vision

2. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (RMCO) dibentuk bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 50A/KEPDIR/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Komite Manajemen Risiko.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko di Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO	
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Operasional
	Direktur Dana dan Jasa

	Direktur Kredit dan Syariah
	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer Mikro
	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
	Pemimpin Divisi Produk & Jasa
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Misi, Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki Misi, Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

a. Misi

Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Sehingga, Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank yang senantiasa tidak lepas dari risiko.

b. Tugas dan Tanggung jawab

- Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko yang efektif di Bank Riau Kepri.
- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan *eksposure* risiko.
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia yang menyangkut penerapan manajemen risiko.
- Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/ dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

- Menjalankan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2017 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2017	
Tanggal	**Agenda**
20 Januari 2017	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2016
26 Juli 2017	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank periode Juni 2017
29 Desember 2017	Pembahasan *Risk Appetite Statement* tahun 2018

3. Komite Pembiayaan

Bank telah membentuk Komite Pembiayaan yang bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan. Pembentukan Komite Pembiayaan ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 033/KEPDIR/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Susunan dan Tata Tertib Komite Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Pembiayaan Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE PEMBIAYAAN	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kredit dan Syariah
Sekretaris (merangkap anggota)	Pemimpin Divisi Syariah
Anggota	Direktur Dana dan Jasa
	Pemimpin Bagian Pembiayaan – Divisi Syariah
	Pemimpin Bagian Perencanaan, Pengembangan Produk dan Jasa – Divisi Syariah
Supporting	Staf Pembiayaan – Divisi Syariah
	Staf Analis Pembiayaan – Divisi Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain sebagai berikut :

a. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

b. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.

c. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan komite pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan pembiayaan.

Rapat Komite Pembiayaan

Sepanjang tahun 2017 Komite Pembiayaan telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN TAHUN 2017	
Tanggal	**Agenda**
25 April 2017	Rapat Pembahasan Komite Pembiayaan PT PLN (Persero)

4. Komite ALCO

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan *asset* dan *liability*, Bank Riau Kepri telah memiliki Komite ALCO yang tertuang di dalam Keputusan Direksi tentang *Asset Liability Management* PT. Bank Riau Kepri.

Saat ini ketentuan mengenai Komite ALCO diatur di dalam Keputusan Direksi No. 25/KEPDIR/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Direksi No. 54/KEPDIR/2004 tentang *Asset Liability Management* PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite ALCO Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ALCO	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap Ketua Pengganti	Direktur Dana dan Jasa
Wakil Ketua	Direktur Kredit dan Syariah

	Direktur Operasional
Sekretaris	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
Anggota	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer
	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
	Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
	Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah melakukan pengelolaan *Asset* dan *Liabilities Management* (ALMA) yang meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management*, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi Bank Riau Kepri dengan menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate/prime landing rate* dan menetapkan *internal fund transfer price.*

Rapat Komite ALCO

Sepanjang tahun 2017, Komite ALCO telah menyelenggarakan 7 kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut :

RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2017	
Tanggal	**Agenda**
5 Januari 2017	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Januari 2017 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Januari 2017 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
27 Februari 2017	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Februari 2017 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Februari 2017 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
20 Maret 2017	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Maret 2017 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Maret 2017 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
8 Mei 2017	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Mei 2017

	2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Mei 2017 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
19 Juni 2017	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Juni 2017 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juni 2017 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
25 Juli 2017	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Juli 2017 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juli 2017 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
30 November 2017	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) November 2017 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) November 2017 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO

5. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan sektor yang sangat strategis di setiap usaha keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam. Setelah itu, harus diimplementasikan secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat.

Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 62/KEPDIR/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Komite Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Kredit dan Syariah
Wakil Ketua	Direktur Operasional
Sekretaris I	Pemimpin Divisi Komersial
Sekretaris II	Pemimpin Divisi Konsumer
Sekretaris III	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
Anggota	Pemimpin Divisi Syariah

	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
	Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan, meliputi sebagai berikut :

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.

b. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.

c. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.

d. Memantau dan mengevaluasi :

   1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;

   2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;

   3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;

   4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;

   5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;

   6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan

   7) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan, adalah sebagai berikut :

a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai :

   1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB;

   2) Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.

b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Sepanjang tahun 2017 Komite Kebijakan Perkreditan telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN TAHUN 2017	
Tanggal	**Agenda**
29 Desember 2017	Rapat Komite Kebijakan Perkreditan tentang perubahan: 1. Usulan perubahan SK Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi dan Pencabutan SK Penetapan Penilaian (Skoring) Limit Wewenang memutus krdit dan bank garansi pemimpin unit kantor Bank Riau 2. Usulan Perubahan SK Nomor 58/KEPDIR/2017 Tentang Kebijaksanaan Perkreditan Bank

6. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank diatur di dalam BPP Kepegawaian Bank Riau Kepri Bab IV Masa Orientasi, Penempatan dan Mutasi, poin 4.8 Komite Sumber Daya Manusia dan Tim Mutasi Tenaga Pimpinan.

Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia	
Direktur Utama	Ketua (merangkap Anggota)
Direktur Operasional	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia	Sekretaris

Tugas Umum dan Tanggung Jawab Utama Komite SDM, meliputi :

a. Perencanaan dan penerimaan Pegawai :
   - Mempertimbangkan dan menyetujui prakiraan Pegawai
   - Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
   - Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDM secara keseluruhan
   - Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)

b. Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.

c. Manajemen Jalur Karir
   - Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
   - Menentukan Program Jalur Karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
   - Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir

d. Manajemen Imbalan

- Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (*employee benefits*);
- Menyetujui pedoman cara-cara penggajian dan pemberian imbalan lainnya

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2017 Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2017	
Tanggal	**Agenda**
22 Maret 2017	Penetapan Promosi dan Mutasi Pegawai dan Penempatan PCP 2016
8 Mei 2017	Penetapan Promosi dan Mutasi Pegawai Terkait Pengisian Jabatan yang Lowong
11 September 2017	1. Pembahasan Rencana Suksesi Pejabat Eksekutif 2. Review Remunerasi Pengurus 3. Penetapan Promosi dan Mutasi Pegawai
28 Desember 2017	Pembahasan Program Pengembangan SDM dan Pengisian Jabatan

7. Komite Anti *Fraud*

Susunan Keanggotaan

Komite Anti *Fraud* dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 091/KEPDIR/2017 tanggal 13 November 2017, dengan komposisi keanggotaannya adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ANTI *FRAUD*	
Ketua	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
Sekretaris	Pemimpin Unit Investigasi *Fraud*
Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Hukum
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Anti *Fraud* memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membuat pedoman penerapan strategi anti *fraud* untuk diterapkan Bank yang disetujui oleh Direksi.
b. Mendorong dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya yang terkait untuk menjalankan pelaksanaan implementasi strategi anti *fraud* yang telah disetujui Direksi.
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kejadian-kejadian *fraud* dan memastikan dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya kembali *fraud* yang serupa.
d. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran secara periodik terhadap seluruh pegawai terkait dengan kebijakan, prosedur dan penerapan strategi anti *fraud* yang ditetapkan bank.
e. Mengkoordinasikan peningkatan pemahaman pegawai mengenai *fraud* seperti bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.
f. Mengkoordinasikan peningkatan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dengan cara pembuatan brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya.
g. Menetapkan metode penilaian dan pengukuran terhadap kejadian *fraud* termasuk proses monitoring dan kontrol serta pengelolaan *database* untuk setiap kejadian *fraud* baik yang sudah terjadi maupun dalam usaha percobaan namun tidak terealisasi.
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi kerawanan dengan melakukan identifikasi, analisis dan menilai potensi terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktifitas bank.
i. Mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kerawanan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktifitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.
j. Berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan dalam penerapan *whistleblowing system* serta SKAI dalam pelaksanaan *surprise audit* dan *surveillance system*.
k. Memantau dan melaporkan pelaksanaan strategi anti *fraud* kepada Direksi dan regulator/otoritas secara berkala.

Rapat Komite Anti *Fraud*

Sepanjang tahun 2017 Komite Anti *Fraud* telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE ANTI *FRAUD* TAHUN 2017	
Tanggal	**Agenda**
9 Januari 2017	Pembahasan Laporan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2016
3 Oktober 2017	Pembahasan Laporan Strategi Anti Fraud Yang Diminta Tim Pemeriksa OJK

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan Bank saat ini diatur di dalam kebijakan Direksi mengenai Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 56/KEPDIR/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest)*. Di dalam kebijakan tersebut diatur mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan serta sanksi jika terjadi benturan kepentingan.

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2017.

PENERAPAN FUNGSI DAN BUDAYA KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat menjadi tolak ukur atas penilaian nasabah dan pemegang saham terhadap kinerja Bank.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sedangkan Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Riau Kepri telah menyusun dan memberlakukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 042/KEPDIR/2017 tanggal 31 Mei 2017. BPP Kepatuhan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang nantinya diharapkan akan menjadi lebih *forward looking* dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan pada kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diatur sebagai berikut :

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak pemeriksa eksternal lainnya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan, meliputi antara lain :

   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

   b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

   d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.

   e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

   f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak pemeriksa eksternal lainnya.

   h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

   Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme meliputi antara lain :

   a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

   b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

c. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach*.

d. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif.

e. Memastikan bahwa Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan keluar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU dan PPT.

4. Direktur Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:

   a. bisnis dan operasional;

   b. manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;

   c. treasury;

   d. keuangan dan akuntansi;

   e. logistik dan pengadaan barang/jasa;

   f. teknologi informasi; dan

   g. audit intern/SKAI.

5. Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi :

   a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank;

   b. Laporan kepatuhan; dan

   c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurutnya telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur Kepatuhan.

   Laporan sebagaimana dimaksud di atas wajib ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan, dan disampaikan kepada OJK secara semesteran dan diterima OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :

   a. Menyusun *Compliance Charter* (piagam kepatuhan).

   b. Menyusun *Compliance Code of Conduct* (kode etik kepatuhan).

   c. Menyusun *Compliance Policy* (kebijakan kepatuhan).

2. Melakukan sosialisasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri.
3. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan dan *Whistle Blowing System.*
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman APU & PPT serta pedoman Tata Kelola yang Baik.
5. Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
6. Memantau tindaklanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.
7. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan Tata Kelola.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan rencana kerja Kepatuhan yang dimuat di dalam laporan Rencana Bisnis Bank (RBB).
10. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Terkait dengan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, Bank telah melaporkan kepada OJK, antara lain sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KETENTUAN KEHATI-HATIAN BANK		
Jenis Laporan	**Penilaian Pada Periode Laporan**	
	Juni 2017	**Desember 2017**
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20,62 %	21,75 %
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	0,06 %	0,04 %
Kredit Kualitas Rendah	9,23 %	6,53 %
Non Performing Loan (NPL) Gross	4,49 %	3,92 %
Non Performing Loan (NPL) Netto	0,15 %	0,10 %
Tingkat Kesehatan Bank	3 (Cukup Sehat)	2 (Sehat)

Langkah-langkah yang telah ditempuh dan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di atas masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait pemahaman dan disiplin karyawan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dan sistem kontrol atas implementasi terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip Tata Kelola yang Baik dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Unit Kerja Di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan memiliki 3 (tiga) unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur Kepatuhan Bank. Unit kerja yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum. Pembentukan unit kerja tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Divisi Kepatuhan

a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

b. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak pemeriksa eksternal lainnya.

g. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi dan Budaya Kepatuhan Bank.

h. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

i. Membuat laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

(SIPESAT) untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

j. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach.*

k. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sesuai dengan pedoman Bank.

l. Menyusun laporan Direktur Kepatuhan berupa :

   1) Laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;

   2) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT);

   3) Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan :

      - Laporan Kepatuhan semesteran;
      - Laporan Khusus.

m. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

n. Memantau penyampaian laporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak ekstern lainnya pada masing-masing satuan kerja.

o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2. Divisi Manajemen Risiko

a. Mengelola kebijakan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.

b. Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMCO dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya.

c. Mengembangkan metode dan modul pengukuran risiko.

d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).

e. Mengembangkan perangkat aplikasi pengukuran dan pengendalian risiko.

f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk atau aktivitas baru serta mendukung/memberikan solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit kerja terkait lainnya.

g. Melakukan pengukuran, analisa risiko kredit, pemantauan dan pengendalian, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.

h. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional dan atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO).

i. Meningkatkan kompetensi pengurus dan pejabat Bank dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko.

3. Divisi Hukum

a. Bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum yang dihadapi oleh Bank, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

b. Bertanggungjawab dalam hal membuat perjanjian/perikatan antara Bank dengan pihak ketiga dan kegiatan dibidang hukum lainnya.

c. Memberikan bantuan *advis*/saran hukum menyangkut permasalahan hukum yang terjadi di Bank.

Sistem Kepatuhan

Sistem Kepatuhan Bank dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku, meliputi :

1. Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*)

   Dimaksudkan untuk membangun *awareness* segenap jajaran Bank terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

2. Pengujian Kepatuhan (*Compliance Review*), meliputi :

   a. Pengujian Kebijakan

      Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan ketentuan eksternal lainnya.

   b. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan

      Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.

   c. Pengujian Permasalahan Operasional Bank

      Adalah pengujian terhadap permasalahan-permasalahan operasional Bank pada setiap satuan kerja, meliputi permasalahan sebagai berikut :

      - Belum ada peraturan internal yang mengatur, sehinga satuan kerja perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan BI/OJK dan ketentuan yang berlaku.

- Kebijakan yang akan diambil telah diatur di dalam ketentuan internal, namun perlu penafsiran/penjelasan lebih lanjut.

Kegiatan Unit Kerja Kepatuhan

Sesuai dengan SOT Bank Riau Kepri, struktur Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) memiliki 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan Bagian Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). Sepanjang tahun 2017 Divisi Kepatuhan telah melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya namun tidak terbatas pada :

1. Melakukan pengkajian Rencana Keputusan dan Rancangan Kebijakan Bank.
2. Melakukan pengkajian dan pengujian kepatuhan terhadap produk dan jasa Bank.
3. Memastikan bahwa tidak terjadi denda akibat keterlambatan Laporan pada Bank Indonesia/OJK.
4. Melakukan monitoring terhadap temuan Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun 2016 kepada pihak-pihak terkait.
6. Menyusun dan menerbitkan beberapa kebijakan Bank yaitu sebagai berikut :
   a. SK Direksi No. 042/KEPDIR/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
   b. SK Direksi No. 082/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola.
7. Melakukan sosialisasi dan komunikasi ke seluruh jajaran Pegawai Bank Riau Kepri mengenai Tata Kelola yang Baik, Budaya Kepatuhan dan Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) serta *Whistleblowing System* .
8. Menyampaikan laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) kepada PPATK secara *online* melalui Aplikasi GRIPS sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
9. Menyampaikan *action plan* penerapan program APU dan PPT kepada OJK melalui surat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko No. 351/DIR/2017 tanggal 09 Mei 2017.
10. Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Divisi Kepatuhan sepanjang tahun 2017 telah menyusun dan menerbitkan :
    a. Surat Keputusan Direksi No. 068/KEPDIR/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
    b. Surat Keputusan Direksi Nomor 081/KEPDIR/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Aplikasi Program *Walk in Customer*
    c. Surat Keputusan Direksi No. 103/KEPDIR/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah.

11. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan pengkinian data Nasabah dan *progress* kegiatan *single* CIF ke beberapa jaringan kantor cabang Bank.
12. Memberikan pelatihan APU & PPT termasuk penerapan Tata Kelola Bank secara berkala kepada petugas *frontliner (customer service* dan *teller*) baru dan *refresh* serta kepada Pemimpin Seksi Pelayanan Cabang, Pemimpin Seksi Operasional Capem dan Pemimpin Kedai (baru & *refresh*).
13. Mengikutsertakan pegawai Divisi Kepatuhan pada *Public Training* yang diselenggarakan oleh FKDKP.
14. Mengikutsertakan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan OJK pada :
    a. pelatihan "*Money Laundering* dan *Financing Risk Assessment* sesuai POJK 12/2017" diselenggarakan oleh Info Bank pada tanggal 27-28 Juli 2017, diikuti oleh 1 orang pegawai;
    b. pelatihan "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Bisnis Perbankan" yang diselenggarakan oleh FKDKP, diikuti oleh 4 orang pegawai pada tanggal 09-10 Agustus 2017 dan 2 orang pegawai pada tanggal 25-26 Oktober 2017.
15. Melakukan penyesuaian parameter secara berkala untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
16. Melakukan penyempurnaan infrastruktur terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan terhadap calon nasabah dan nasabah Bank.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan *(Compliance Director)* dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), ditetapkan bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern Bank, untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, SKAI harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional Bank, sejak awal Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja yang menjalankan fungsi audit intern untuk memastikan bahwa struktur pengendalian intern yang ada pada Bank telah berjalan sebagaimana mestinya.

Susunan Organisasi dan Panduan Kerja Audit Intern

Berdasarkan SK Direksi No. 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, ditegaskan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh seorang Pemimpin SKAI setingkat Pemimpin Divisi, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. SKAI memiliki 2 (dua) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Pengawasan dan Bagian Pemeriksaan.

Dalam melakukan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)* dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengawasan Berbasis Risiko yang tertuang di dalam SK Direksi Nomor 63/KEPDIR/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang telah diubah dengan diterbitkannya Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Riau Kepri sebagaimana ditetapkan di dalam SK Direksi Nomor 097/KEPDIR/2017 tanggal 30 November 2017, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai standar yang memuat ukuran minimal tentang Fungsi Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh Bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern tersebut.

Persyaratan Auditor Internal

Auditor Internal Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 56A/KEPDIR/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Persyaratan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib memiliki standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional.
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan SK Direksi No. 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, *Internal Audit Charter* dan BPP Pengawasan Berbasis Risiko sebagaimana telah diubah dengan BPP Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Riau Kepri, Satuan Kerja Audit Intern melakukan tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja/strategi bisnis Satuan Kerja Audit Intern dan unit kerja di bawah supervisi dalam bentuk KPI *(Key Performance Indicator).*
2. Menyusun anggaran *(budget)* tahunan dan melakukan monitoring/pengendalian atas pelaksanaannya.
3. Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan secara aktif (*on-site)* dan pemantauan secara pasif *(off-site*) serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
4. Memberikan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan prosedur yang ada pada seluruh aspek kegiatan Bank untuk memperoleh keyakinan tercapainya tujuan dan sasaran Bank secara optimal.
5. Melaksanakan proses kegiatan audit secara profesional dan independen dan proaktif serta kontinyu sesuai dengan *internal audit charter* dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Riau Kepri dan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan audit terhadap hal-hal di luar rencana kerja, baik itu atas permintaan internal maupun eksternal yang berwenang sesuai persetujuan Direksi.
7. Melakukan koordinasi tugas dan mendampingi pemeriksaan eksternal dalam rangka kelancaran pemeriksaan.
8. Me-*review* semua kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi audit intern dalam melakukan tugasnya.
9. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank Riau Kepri untuk memberikan nilai tambah (*value added*) sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Bank ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 56A/KEPDIR/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Satuan Kerja Audit Intern

2. Tujuan Satuan Kerja Audit Intern
3. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern
4. Independensi dan Obyektivitas Satuan Kerja Audit Intern
5. Persyaratan Auditor Internal
6. Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Intern
7. Wewenang Satuan Kerja Audit Intern
8. Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern
9. Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas internal audit
10. Tanggung jawab Direksi dalam mendukung efektivitas internal audit
11. Lain-Lain

Laporan Kegiatan Audit Internal

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern tahun 2017 yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, SKAI telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2017 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Audit Umum (*on site*) terhadap 18 (sembilan belas) kantor cabang Bank dan 5 (lima) Divisi di Kantor Pusat Bank.
2. Membuat Laporan *Quality Assurance* terhadap 19 (sembilan belas) kantor cabang Bank.
3. Melakukan *review* dan perubahan terhadap BPP *Risk Based Audit* dengan mencabutnya dan menerbitkan BPP SKAI sebagaimana ditetapkan di dalam SK Direksi Nomor 097/KEPDIR/2017 tanggal 30 November 2017.
4. Melakukan edukasi *Governance Risk and Compliance* bersama dengan Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko ke beberapa jaringan kantor Bank.
5. Melakukan pelatihan dan pertemuan intern SKAI serta pembekalan dan sertifikasi Audit Intern.
6. Melakukan *Post Implementation Review* terhadap Sistem Laku Pandai dan Relokasi Data Center.
7. Melakukan Audit pada Divisi dan Kantor Cabang sesuai dengan hasil *Risk Assessment* dengan *risk level* prioritas utama dan risiko tinggi lebih didahulukan untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu :

Audit Umum Bidang Perkreditan, Operasional & IT

No.	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Umum Cabang Syariah Tanjung Pinang	15 Februari – 3 Maret 2017
2	Audit Umum Cabang Bagan Siapi api	15 Februari - 7 Maret 2017
3	Audit Umum Cabang Pangkalan Kerinci	16 Februari - 10 Maret 2017

4	Audit Umum Cabang Pasar Pusat	16 Februari - 14 Maret 2017
5	Audit Umum Cabang Tembilahan	25 April - 13 Mei 2017
6	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru	5 Mei - 9 Juni 2017
7	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian	7 - 31 Mei 2017
8	Audit Umum Cabang Bangkinang	8 - 30 Mei 2017
9	Audit Umum Cabang Dumai	11 - 24 Juni 2017
10	Audit Umum Cabang Ranai	13 - 31 Agustus 2017
11	Audit Umum Cabang Selatpanjang	13 - 30 Agustus 2017
12	Audit Umum Cabang Air Molek	13 Agustus - 07 September 2017
13	Audit Umum Cabang Siak Sri Indrapura	24 September - 21 Oktober 2017
14	Audit Umum Cabang Tanjung Balai Karimun	24 September - 08 Oktober 2017
15	Audit Umum Cabang Bengkalis	23 Oktober - 10 November 2017
16	Audit Umum Cabang Teluk Kuantan	12 November- 01 Desember 2017
17	Audit Umum Cabang Batam	20 November- 15 Desember 2017
18	Audit Umum Cabang Utama	04 - 12 Desember 2017
20	Audit Umum Divisi Mikro, Kecil & Menengah	31 Maret 2017 - 10 April 2017
21	Audit Umum Divisi Hukum	14 - 22 Juni 2017
22	Audit Umum Divisi Komersial	23 Agustus - 06 September 2017
23	Audit Umum Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia	16 - 27 Oktober 2017
24	Audit Umum Divisi Umum	06 - 22 Desember 2017

Audit Lainnya

No.	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Khusus Kedai Pasar Sail	10 - 14 dan 24 - 28 Juli 2017
2	Audit Khusus Kedai Rantau Kasai	02 - 18 Agustus 2017
3	Audit Tematik Cabang Utama, Cabang Pekanbaru, Capem Senapelan, Capem Tuanku Tambusai	28 Agustus - 11 September 2017
4	Audit Umum PT Yastera	23 Oktober - 03 November 2017
5	Audit Khusus Cabang Tanjung Balai Karimun dan Cabang Syariah Tanjung Pinang	23 - 27 Oktober 2017
6	Audit Khusus Capem Syariah Duri	23 - 27 Oktober 2017
7	Audit Khusus Cabang Bengkalis	11 - 15 Desember 2017

8. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil SKAI, maka kepada beberapa orang pegawai SKAI setiap tahunnya diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Pada tahun 2017 ini pegawai

SKAI telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan audit atau organisasi yang bergerak di bidang audit dengan pemberi materi yang telah berpengalaman. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme *"Sharing Moment"* sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor SKAI.

9. Dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi seluruh auditor, telah dilaksanakan Pelatihan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA). Pegawai dan Pejabat SKAI yang telah lulus/memiliki sertifikat QIA dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Zulkifli Malik, SH, QIA	Auditor Cabang
2.	Edi Muchni, SE, QIA	Auditor Kantor Pusat

Program Pengendalian Mutu

SKAI memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari :

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. *Review Intern,* dilakukan terhadap Auditor SKAI secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. Untuk tahun 2017, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, SKAI melalui Pemimpin SKAI dan atau Pemimpin Bagian *Internal Control* telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA). Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, SKAI juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.

Quality Assurance

No	Keterangan	Pelaksanaan *Quality Assurance*
1	Auditor Cabang Syariah Tanjung Pinang	2 Maret 2017
2	Auditor Cabang Bagan Siapi-api	6-7 Maret 2017
3	Auditor Cabang Pangkalan Kerinci	9-10 Maret 2017
4	Auditor Cabang Pasar Pusat	14 Maret 2017
5	Auditor Cabang Tembilahan	9 Mei 2017
6	Auditor Cabang Syariah Pekanbaru	16 Mei 2017
7	Auditor Cabang Pasir Pengaraian	22 Mei 2017
8	Auditor Cabang Bangkinang	24 Mei 2017
9	Auditor Cabang Dumai	21 Juni 2017
10	Auditor Cabang Teluk Kuantan	18-19 September 2017
11	Auditor Cabang Air Molek	19-20 September 2017
12	Auditor Cabang Utama	22 September 2017

13	Auditor Cabang Siak Sri Indrapura	25-26 September 2017
14	Auditor Cabang Bengkalis	27 September 2017
15	Auditor Cabang Selatpanjang	28 September 2017
16	Auditor Cabang Ranai	11 Desember 2017
17	Auditor Cabang Tanjung Balai Karimun	12 -13 Desember 2017
18	Auditor Cabang Batam	14 Desember 2017
19	Auditor Cabang Tanjung Pinang	15 Desember 2017

3. *Review Ekstern*, dilakukan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk menilai mutu kegiatan SKAI Bank Riau Kepri atas pelaksanan audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, maka fungsi SKAI harus di-*review* oleh pihak ekstern minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Sampai saat ini, SKAI telah 5 (lima) kali di-*review* oleh pihak ekstern dengan urutan sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun	Untuk Periode
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2016	2014 – 2016
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2013	2011 – 2013
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2010	2007 – 2010
KAP Drs. J. Tanzil & Rekan	2007	2004 – 2007
BPKP Riau	2004	2001 – 2004

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun 2017, Dewan Komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS untuk menunjuk Auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2017.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui surat Komite Audit No. 005/KA-BRK/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) di atas, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk melaksanakan Audit Kepatuhan & Teknologi Sistem Informasi Bank Riau Kepri tahun 2017.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan merupakan akuntan publik yang terdaftar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) YANG MEMERIKSA BANK RIAU KEPRI TAHUN BUKU 2017			
Nama KAP	**Pimpinan Rekan**	**Izin Usaha**	**Alamat**
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Sriyadi, MM, CPA, BKP	Menteri Keuangan KEP. 140/KM.1/2012	Rukan Tanjung Mas Raya Blok B1 No. 22 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP merupakan entitas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM-LK, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Bank Riau Kepri, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank, tidak memberikan jasa lain kepada Bank Riau Kepri pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank Riau Kepri lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, serta mampu melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi dan SPKN (Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara).

Hasil audit Laporan Keuangan Bank Riau Kepri tahun 2017 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan tanggal 18 Januari 2018 mendapat opini "**Wajar Dalam Semua Hal Yang Material**".

Berikut disampaikan beberapa Kantor Akuntan Publik yang telah memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun Buku	Penilaian
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2017	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2016	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
Eka Masni, Bustaman & rekan	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
Tjahjo, Machdjud Modopuro & rekan	2014	Wajar Tanpa Pengecualian
Abdi Ichjar, BAP & rekan	2013	Wajar Tanpa Pengecualian

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank Riau Kepri di dalam melakukan pengelolaan risikonya menerapkan 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik.

Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map* Basel I dan Basel II serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini, Bank Riau Kepri senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, baik dari Bank Indonesia maupun dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Organisasi Manajemen Risiko

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank Riau Kepri dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko

Bank senantiasa meningkatkan *Risk Awareness* dalam penerapan budaya sadar risiko yang terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Risiko adalah bagian dari bisnis Bank Riau Kepri. Bank mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan mengelola setiap jenis risiko, yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bank telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa melakukan penyempurnaan diberbagai bidang, antara lain peningkatan *risk awareness* dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. Bank memandang kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan kajian risiko terhadap :
   - *limit credit line* dengan *Bank Counterparty* dalam kerjasama *Money Market, Foreign Exchange* dan *Commercial Line*;
   - aktifitas Divisi Operasional, antara lain kajian risiko terhadap penambahan kas limit;
   - draft Surat Edaran Direksi tentang Margin dan Jangka Waktu Pembiayaan Aneka Guna (PAG) iB PT Bank Riau Kepri;
   - relokasi DC *Core Banking*;
   - usulan Bunga Promosi Kredit Aneka Guna (KAG);
   - draft Surat Edaran Direksi tentang tarif Imbalan Pembiayaan Aneka Guna (PAG)iB PT Bank Riau Kepri;
   - penetapan kebijakan pemotongan penghasilan melebihi amprah gaji;
   - Layanan *Call Center* Bank Riau Kepri;
   - kenaikan plafon Kredit Aneka Guna Bagi Pegawai Tetap BP Batam;
   - draft Surat Edaran Direksi tentang Tarif Imbalan Promosi Pembiayaan Aneka Guna (PAG) iB PT Bank Riau Kepri;

- usulan Perpanjangan Suku Bunga Promosi Kredit Aneka Guna (KAG);
- Memorandum Analisa Kredit Untuk Pembiayaan Kredit Sindikasi kepada PT MNC Land;
- Rencana Alih Daya Tahun 2018 PT Bank Riau Kepri.

2. Melakukan advis terhadap :
   - metode Pembayaran Bunga Kredit Agribisnis Replanting Kelapa Sawit BPDPKS;
   - premi asuransi/IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR);
   - draft SE Direksi tentang Suku Bunga, Biaya dan Pelunasan Kredit Segmen Komersial PT Bank Riau Kepri;
   - draft Pedoman Pengadaan Tanah dan Bangunan PT Bank Riau Kepri;
   - usulan skoring kredit mikro, kecil dan menengah;
   - perubahan pedoman kebijakan *Treasury* tentang Transaksi Reksadana Pasar Uang;
   - risiko Implementasi PD dan LGD menggunakan *Migration Analysis* untuk perhitungan CKPN kolektif kredit;
   - pengikatan Agunan kredit Agribisnis MKM;
   - proposal dan kajian bisnis kredit agribisnis replanting kelapa sawit;
   - draft Kebijakan Direksi tentang Layanan SMS Banking PT Bank Riau Kepri;
   - usulan suku bunga Kredit Aneka Guna Pra Pensiun;
   - review kerjasama Pialang Pasar Uang dengan Broker PT Tradition Indonesia;
   - draft SE Direksi tentang Pemberlakuan Agunan Khusus Pembiayaan UMKM iB dibidang Agribisnis;
   - draft Perubahan Ketiga BPP Perkreditan Segmen Komersial;
   - draft Surat Edaran Direksi tentang Kredit KUM MES.
3. Melakukan Monitoring *Risk Appetite Statement* setiap bulan.
4. Melakukan sosialisasi pedoman Strategi anti *fraud*, budaya peduli risiko, implementasi penilaian risiko operasional, assessment risiko operasional dan penerapan *Businness Countinuity Plan*.
5. Melakukan simulasi tanggap darurat kebakaran pada kantor Cabang Bankinang.

Laporan Profil Risiko

Trend Laporan Profil Risiko Bank Riau Kepri sepanjang tahun 2017 relatif stabil dengan peringkat Risiko Inheren *Low to Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory,* sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah **Peringkat 2 *Low to Moderate***.

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO			
Jenis Risiko	**Perangkat Risiko Inheren**	**Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**	**Peringkat Tingkat Risiko**
Risiko Kredit	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Stratejik	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit			**2**

Peringkat komposit Profil Risiko merupakan kesimpulan akhir tingkat risiko Bank setelah memperhitungkan Risiko Inheren dan dengan mempertimbangkan mitigasi yang dilalukan melalui Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dilakukan atas 8 (delapan) jenis risiko dan penetapan Peringkat Komposit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas masing-masing risiko.

Peringkat Komposit Profil Risiko Bank Riau Kepri adalah **2 (*Low to Moderate*)**. Risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian utama Bank adalah **Risiko Operasional** dan **Risiko Stratejik** yang berada pada tingkat risiko ***Moderate*** dan kualitas penerapan manajemen risiko ***Fair***.

Untuk **Risiko Operasional**, jumlah dan kompetensi SDM pada beberapa bidang, pemantauan *Know Your Employee* yang belum diterapkan sepenuhnya, rotasi secara berkala dan masih cukup tingginya transaksi *human error* menjadi gambaran umum dalam penilaian. Upaya berupa sosialisasi, peningkatan kompetensi maupun penyempurnaan pedoman kerja senantiasa dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran, integritas maupun kualifikasi SDM bank. Masih terdapat kegagalan sistem pada jaringan pendukung *core banking* pada beberapa kantor, namun tidak signifikan menganggu operasional bank.

Risiko Stratejik diperlukan penetapan sasaran yang sesuai dengan kemampuan organisasi, perumusan strategi yang lebih *applicable* serta perlu dilakukan pemantauan secara ketat terhadap implementasi strategi dan pencapaian sasaran-sasaran usaha yang telah ditetapkan. Kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan pengendalian intern risiko stratejik.

Risiko lainnya juga masih perlu menjadi perhatian seperti Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan yang berada pada peringkat tingkat risiko *Low to Moderate*.

Untuk Risiko Kredit masih terdapat proses penyaluran kredit yang belum memenuhi kebijakan yang ada terutama belum tajamnya analisis yang dilakukan, belum dilakukan review efektifitas pemantauan dini atas aset bermasalah dan belum optimalnya penagihan

terhadap kredit hapus buku serta evaluasi atas pengelolaan kredit bermasalah secara periodik. Peningkatan pengendalian intern melalui pengawasan oleh atasan langsung dibutuhkan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam proses pemberian kredit.

Untuk Risiko Likuiditas khususnya rasio LDR masih sedikit diatas ketentuan rasio yang telah ditetapkan sebesar 92%, namun pengamanan likuiditas masih dapat terjaga cukup baik menjelang akhir tahun. Peningkatan dana relatif masih belum stabil atau cenderung belum sepenuhnya mengendap di Bank (Pendanaan Non Inti).

Risiko Kepatuhan, masih terdapat pelanggaran berulang seperti pelanggaran LBU, SID dan laporan lainnya serta penyelesaian komitmen temuan yang sebagian masih belum memenuhi target waktu yang disepakati.

Beberapa risiko yang menjadi perhatian utama Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

Jenis Risiko	Faktor Penyebab
Risiko Operasional	a. Seiring dengan semakin berkembangnya struktur organisasi dan skala usaha Bank, masih terdapat kelemahan terkait dengan jumlah SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi SDM khusus bidang Treasury, Perkreditan, SKAI, IT dan Syariah. b. Frekuensi kegagalan karena faktor manusia *(human error)* pada periode laporan masih cukup tinggi, namun tidak mengakibatkan kerugian material yang besar (*low impact*). c. Masih terdapat kegagalan yang terkait dengan penggunaan mesin ATM, sehingga menyebabkan terjadinya selisih antara uang yang tersedia di ATM dengan pencatatan Bank. d. Budaya manajemen risiko operasional telah disosialisasikan kepada hampir keseluruh level organisasi namun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara konsisten, hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya pelanggaran prosedur dalam operasional dan tidak sejalannya dengan strategi pengendalian internal bank.
Risiko Stratejik	a. Dalam penyusunan CorporatePlan masih belum diimbangi dengan kecukupan sumber daya, penyelarasan dengan Visi Provinsi Riau 2020, marketshare bank dan data historis perkembangan kinerja Bank. b. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha bank belum cukup optimal, BOPO Bank Riau Kepri = 76,99% atau lebih tinggi dari rata-rata BOPO seluruh BPD = 76,90%. c. Pangsa pasar aset Bank Riau Kepri dibandingkan rata-rata seluruh BPD mencapai 10,16% di atas rata-rata BPD, sedangkan untuk rata-rata laba, kredit dan DPK sebesar 2,8% di bawah rata-rata BPD. d. Perubahan kondisi ekonomi makro mulai berdampak cukup signifikan terhadap kondisi bank dengan adanya PMK No. 235 dan

	pengurangan dana DBH, mengingat sebagian besar debiturnya adalah PNS sedangkan di sisi sumber dana sebagian besar berasal dari dana milik Pemda. e. Perubahan kondisi ekonomi makro berdampak cukup signifikan terhadap kondisi bank dengan adanya PMK 235 dan pengurangan dana DBH, sebagian besar debitur adalah PNS sedangkan disisi sumber dana sebagiannya berasal dari dana milik Pemda. f. Rata-rata pencapaian kinerja keuangan dibanding RBB yaitu sebesar 93,12%, yaitu dari sisi penyaluran kredit hanya tercapai sebesar 92,79%, target laba sebesar 90,34%, target DPK sebesar 90,72% dan target aset sebesar 98,08 dari RBB yang ditetapkan pada tahun 2017. g. Realisasi pembukaan jaringan baru berupa ATM/ Kantor Cabang Pembantu/ Kedai tercapai sebesar 14,3% dari target yang telah ditetapkan pada RBB 2017. Sedangkan realisasi penerbitan produk/ aktivitas baru tercapai sebesar 9,1% pada periode penilaian. h. Budaya manajemen risiko stratejik telah disosialisasikan hampir keseluruh level organisasi, tapi belum cukup kuat dilihat dari penyusunan KPI yang belum disesuaikan dengan RBB sehingga berdampak kecilnya realisasi target RBB i. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko stratejik cukup memadai dan telah tersedia namun masih terdapat Kebijakan Umum Direksi yang tercantum di dalam target tidak disertai asumsi, kajian dan analisa yang komprehensif sehingga target yang ditetapkan dalam *Corporate Plan* tidak tercapai.

Pengelolaan Risiko

Upaya-upaya Bank untuk mengelola risiko yang terjadi yaitu dengan menyusun Kebijakan, Prosedur dan Penetapan limit risiko yang memadai antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Direksi No. 048/KEPDIR/2017 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor 98/KEPDIR/2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Business Continuity Management*;
2. Keputusan Direksi No. 049/KEPDIR/2017 tentang Tim Kerja *Business Continuity Plan* (BCP) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
3. Keputusan Direksi No. 050/KEPDIR/2017 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Riau Kepri;
4. Keputusan Direksi No. 051/KEPDIR/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank Riau Kepri;
5. Surat Edaran Direksi No. 027/SE/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan *Business Continuity Plan* (BCP) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

6. Surat Edaran Direksi No. 030/SE/2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Pelaporan Contigency Funding Plan;
7. Keputusan Direksi No. 053/KEPDIR/2017 tentang Kebijakan *Risk Appetite Statement* Tahun 2017;
8. Keputusan Direksi No. 074/KEPDIR/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Sistem Pengendalian Intern;
9. Keputusan Direksi No. 085/KEPDIR/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Contingency Funding Plan* (CFP);
10. Keputusan Direksi No. 091/KEPDIR/2017 tentang Pedoman Strategi Anti *Fraud*;
11. Keputusan Direksi No. 105/KEPDIR/2017 tentang Kebijakan *Risk Appetite Statement* Tahun 2018.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2017, pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

PELAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	
Direksi	**Dewan Komisaris**
1. Melakukan kajian terkait dengan kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan termuat di dalam BPP Manajemen Risiko. 2. Melakukan kajian risiko terhadap rencana dan pelaksanaan aktifitas operasional bank yang dilakukan oleh seluruh unit bisnis. 3. Menyusun dan melampirkan laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bank. 4. Menyusun Kebijakan terkait wewenang limit transaksi, wewenang limit kas. 5. Mereview Pedoman *Business Countinuity Management* dan menyusun kebijakan	1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). 2. Mengawasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko terutama terkait dengan pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas.

terhadap tim kerja *Business Countinuity Plan.* 6. Menyusun kebijakan pedoman penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 7. Menyusun Kebijakan Pedoman Pemantauan dan Pelaporan *Contingency Funding Plan.* 8. Menyusun Kebijakan Pedoman Sistem Pengendalian Intern. 9. Menyusun kebijakan tentang Pedoman Strategi Anti *Fraud.* 10. Menyusun kebijakan *Risk Appetite Statement* tahun 2018. 11. Mensosialisasikan kebijakan Strategi anti *fraud*, budaya peduli risiko, implementasi penilaian risiko operasional, assessment risik o operasional dan penerapan *Businness Countinuity Plan.*	

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup mampu secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank. Sistem pengendalian intern yang memadai telah diterapkan secara menyeluruh. Kedepan kebijakan dan prosedur yang digunakan tersebut akan terus dilakukan review dan pengujian terhadap kebijakan dan produk Bank sesuai dengan kompleksitas, dan ketentuan yang berlaku.

Untuk tahun 2017 kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang dilakukan adalah dengan menerbitkan *Risk Appetite Statement* tahun 2018 sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Direksi No. 105/KEPDIR/2017 tentang Kebijakan *Risk Appetite Statement* Tahun 2018.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Satuan kerja manajemen risiko melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian dan review terhadap setiap produk Bank guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

Pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan dalam bentuk *risk self assesment* disetiap kantor Cabang yang selanjutnya disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko secara *online*, sebagai bahan monitoring seluruh Cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko.

Hasil monitoring *risk self assesment* dianalisis dan dibuat laporan oleh Divisi Manajemen Risiko secara triwulanan dan menyampaikan laporan tersebut ke Unit kerja terkait, Direksi dan Komisaris termasuk kepada pihak eksternal terkait lainnya.

Bank telah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dihadapi.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank sangat berhati-hati dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait, sehingga porsi kredit kepada pihak terkait dalam total kredit yang diberikan Bank relatif sedikit.

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dilakukan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006.

Secara umum Bank telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait yang disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rentang waktu selama tahun 2017, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Untuk pelaksanaan kewajiban laporan, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal BMPK dimaksud di atas secara konsekwen dan tepat waktu. BMPK Bank Riau Kepri periode Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT		
Konvensional	**Syariah**	**Keterangan**
Nominal (dalam jutaan Rp)	Nominal (dalam jutaan Rp)	
551.426 (1 Peminjam) 689.282 (1 Kelompok Peminjam)	---	Untuk perhitungan BMPK Syariah masih masuk di dalam perhitungan BMPK Konvensional

Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Riau Kepri periode per Desember 2017 :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	1	Rp451.076.042,-
2	Kepada debitur inti : a. individu b. group	25 17 8	Rp339.392.920.171,- Rp46.654.555.948,- Rp292.738.364.223,-

RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank

Langkah-langkah Strategis *(Inisiatif Strategic)* yang menjadi fokus Bank tahun 2017 antara lain adalah :

1. Dana Pihak Ketiga
   - Fokus pada DPK non Pemda
   - Diversifikasi produk dan layanan berbasis teknologi
   - Implementasi Unit *Priority Banking*
   - Penyempurnaan Program *Marketing Communication* yang sejalan dengan *Repositioning Product* dan *Brand Image.*
2. Penyaluran Kredit
   - Kredit Produktif terutama Kredit UMKM
   - Penerapan penyaluran kualitas kredit pada UMKM melalui *Scoring System*
   - Optimalisasi partisipasi dan kerjasama dalam penyaluran kredit baik kredit program maupun kredit lainnya (KUR/LBDP/BPDP, Program Sejuta Rumah, Jaring) dengan instansi Pemerintah terkait
   - Pendirian unit KPR Center di Pekanbaru
   - Revitalisasi fungsi Kedai dalam rangka penyaluran Kredit Mikro Kecil
   - Internalisasi penerapan *Credit Risk Management* dan pengaturan limit kredit
3. Perbaikan kualitas kredit
   - Memonitor kualitas kredit secara sistematis pada setiap kantor
   - Selain proses penyelamatan dan penyelesaian, eksekusi kredit bermasalah dilakukan melalui jalur hukum
4. Sumber Daya Manusia
   - Pemetaan ulang komposisi karyawan (bisnis dan non bisnis, kantor pusat dan kantor cabang)
   - Program pengembangan karir berbasiskan kinerja dan kompetensi, termasuk penerapan konsep *e-recruitment* (rekrutmen *online*)
   - Penerapan konsep lelang dan *talent management* pada program pengembangan karir

- Peningkatan kompetensi pada seluruh karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan yang terpadu pada *Leraning Center Program,* termasuk program pendidikan pegawai di Perguruan Tinggi terkemuka di luar negeri
- Internalisasi program budaya kerja produktif secara berkesinambungan
- Penerapan KPI yang transparan dan terukur pada semua lini pegawai termasuk Direksi
- *Review* dan evaluasi serta implementasi pola remunerasi yang selaras dengan beban dan tanggung kerja dan dibandingkan dengan *peer group*
- Penerapan *Human Resources Information System*
- Pemenuhan jumlah pegawai pada *business unit : funding officer* dan *relationship officer* dalam percepatan pertumbuhan bisnis

5. Pengawasan Internal

- Penyempurnaan sistem pengawasan internal dan standardisasi kualitas auditor
- Penerapan *Credit Risk Management* yang terukur
- Internalisasi program GRC (*Governance Risk Compliance*) pada semua lini pegawai

6. Operasional

- Implementasi MIS
- Penguatan *IT Security System* dan *Internet Banking Program*
- Otomasi operasional Bank dan efisiensi operasional yang terukur
- Pengkinian dan pembaruan mesin ATM yang berkualitas yang efisien dan *modern menu* (Tarik/Setor)
- Peningkatan porsi *fee based income* menuju 15% dari total pendapatan

7. Pelayanan *Excellent*

- Program *Service Excellent* berkesinambungan untuk pegawai *Front Liner*
- Penerapan *Call Center Program*
- Program *Service Excellent Oriented* untuk seluruh jajaran pegawai

8. Percepatan Proses Bisnis dan Skala Usaha

- Penguatan pembiayaan jangka panjang melalui penerbitan obligasi
- Penguatan dan peningkatan skala usaha melalui penambahan modal dari pemegang saham
- Standardisasi Proses Kerja secara internal dengan penerapan konsep *Service Level Agreement* (SLA) yang terukur

9. Kemandirian dan *Spin Off* Syariah

- Persiapan dan implementasi *Spin Off* Syariah
- Program Kemandirian DPK Syariah (penyempurnaan dan Produk baru, dan peluang kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Urusan Haji, peningkatan *Service Excellent*
- Program percepatan pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas

Rencana Jangka Pendek

Beberapa target jangka pendek yang akan dilakukan oleh Bank antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan tingkat NPL atau kredit bermasalah.

   Strategi yang dilakukan antara lain melalui :

   a. Intensif penagihan melalui pembentukan Tim *Task Force* khusus untuk 5 kantor dengan NPL tinggi.

   b. Mengelompokkan debitur bermasalah berdasarkan potensi dan peluang penyelesaiannya.

   c. Restrukturisasi kredit.

   d. Lelang agunan.

   e. Hapus buku

   f. Menggunakan upaya hukum terhadap debitur-debitur yang tidak kooperatif

2. Peningkatan Dana Pihak Ketiga melalui pengembangan produk dana dan jasa antara lain :

   a. Peningkatan dana non Pemda :

   - Pengembangan produk tabungan seperti bunga setara deposito
   - Pemberian hadiah langsung dan undian tabungan
   - Pengembangan pola bunga untuk produk deposito, seperti :
     - ✓ Deposito dengan bunga dibayar dimuka
     - ✓ Deposito dengan bunga berjalan
     - ✓ Deposito dengan bunga harian
   - Memasarkan produk *Bancassurance,* bekerjasama dengan pihak Asuransi dengan model Reprensi (bukan produk Bank)
   - Sebagai agen penjual Reksadana (APER/*Wealth Management*) untuk meningkatkan nilai invenstasi nasabah
   - Layanan *Priority Banking,* untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah prioritas Bank
   - *Virtual Account* Non Tunai, penyetoran ke rekening *Virtual Account* melalui ATM
   - Penambahan biller fasilitas *payment* pada Teller atau *e-channel.*
   - Kerjasama *co-branding* dengan bank lain untuk produk *e-banking.*
   - Implementasi *Cash Management System*
   - Meningkatkan peran *Funding Officer*
   - Meningkatkan kerjasama dengan Asosiasi dan Komunitas tertentu untuk *co-branding* ATM/Tabungan
   - Kerjasama penerimaan pembayaran SPP Mahasiswa dengan Universitas dan sekolah-sekolah

- Kerjasama dengan instansi vertikal untuk penerimaan setoran gaji (SPAN)
- Pengembangan pembayaran MPN G2 melalui EDC
- EDC *Merchant* yang terintegrasi dengan jaringan ATM Bersama

b. Peningkatan dana pemerintah daerah :

- Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Riau dan Kepulauan Riau untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan dan aplikasi *online* SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kas daerah
- Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Riau dan Kepulauan Riau untuk penerimaan pembayaran pajak daerah secara online seperti PBB, BPTHB, hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir dalam rangka peningkatan setoran pajak daerah
- Pengembangan sistem pembayaran PBB Online melalui ATM

3. Peningkatan Fungsi Intermediasi

   Secara bertahap meningkatkan pertumbuhan kredit produktif terutama penyaluran kredit UMKM dalam rangka mendorong dan mengembangkan pengusaha kecil.

4. Peningkatan Efisiensi

   Dengan semakin besarnya usaha Bank maka akan berdampak pada semakin besarnya biaya operasional yang dikeluarkan. Kebijakan pertumbuhan biaya disesuaikan dengan peningkatan pendapatan.

Rencana Jangka Menengah

1. Pengembangan produk dana dan jasa.

   Untuk meningkatkan kemampuan DPK, Bank akan melakukan pengembangan berbagai produk dana dan jasa antara lain mencakup *Internet Banking,* Layanan *Private Banking, Inquiry* saldo valas melalui *m-banking* serta penambahan biller pada *teller,* ATM, EDC, *m-banking* dan *Cash Management System* (CMS).

2. Meningkatkan pertumbuhan kredit

   a. Fokus pada penyaluran kredit produktif
      - Optimalisasi penyerapan belanja modal pemerintah daerah dengan melakukan pemisahan target antara kredit yang membiayai proyek yang bersumber dari APBD/APBN dan non APBD/APBN
      - Ikut berpartisipasi dalam kredit sindikasi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintah seperti *power plan,* pelabuhan, jalan tol, pasar dan lain-lain
      - Melakukan peningkatan wewenang memutus kredit pimpinan unit kantor sesuai dengan potensi daerah dan kompetensi pimpinan

- Merealisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tiga sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor industri

b. Melakukan sosialisasi kredit kepada SKPD yang berstatus BLUD ke Pemerintah Daerah
c. Optimalisasi fungsi pemasar kredit/ *Relationship Officer* (RO) dalam rangka pemasaran produk kredit
d. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perkreditan melalui peatihan, pembinaan dan pendampingan
e. Mengevaluasi tingkat suku bunga kredit secara berkesinambungan agar tetap bersaing dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku
f. Melakukan diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar
g. Berpartisipasi dalam penyaluran kresit program pemerintah (FLPP, BPDPKS, LPDB dan KUR)
h. Melakukan *customer gathering* bersama rekanan, asosiasi dan pemerintah daerah dalam upaya memasarkan produk kredit bank
i. Mendukung program pemerintah dalam rangka program pembangunan sejuta rumah

3. Pengembangan Usaha Syariah

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah dalam jangka menengah adalah :

a. Melakukan penambahan jaringan kantor melalui pembukaan kantor di daerah potensial maupun melalui peningkatan status jaringan kantor cabang pembantu yang telah ada serta penambahan unit layanan syariah di berbagai daerah di Provinsi Riau dan Kepri ataupun di luar Provinsi Riau dan Provinsi Kepri sehingga mencapai 3-4 unit kantor cabang, 10-15 unit kantor cabang pembantu dan kedai, 2-3 kantor kas serta 55 unit layanan syariah.

b. Melakukan *spin off* unit usaha syariah dalam waktu 1-5 tahun ke depan.

4. Optimalisasi Fungsi SBU

Optimalisasi Fungsi SBU dilakukan melalui penetapan target unit-unit bisnis oleh SBU, penigkatan fungsi monitoring, evaluasi kinerja dan melakukan pembinaan terhadap unit di bawah koordinasi SBU.

5. Penguatan Sarana Pendukung

Optimalisasi sarana pendukung antara lain dilakukan melalui penyediaan IT dan jaringan komunikasi sesuai kebutuhan, gedung kantor yang representatif dan sarana pendukung lainnya.

6. Perluasan Jaringan Distribusi

Perluasan Jaringan Distribusi antara lain dilakukan melalui penambahan jaringan kantor, ATM, CDM, EDC, Oto Banking serta perluasan jaringan kantor ke luar wilayah Provinsi Riau dan Kepri.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peningkatan Kualitas Pelayanan antara lain dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga *frontliner,* optimalisasi sistem pelayanan pengaduan nasabah dan penerapan aplikasi penilaian kualitas pelayanan.

8. Penguatan Pengawasan Internal

   Penguatan pengawasan internal antara lain dilakukan melalui penyesuaian jumlah tenaga auditor cabang yang disesuaikan dengan jumlah jaringan kantor dan volume bisnis, penyempurnaan sistem *Risk Based Audit*, penerapan *Audit Rating System*, Sistem Monitoring Audit dan penyempurnaan *tool risk assesment* tingkat risiko divisi dan Cabang.

9. Penguatan Manajemen Risiko

   Penguatan Manajemen Risiko antara lain dilakukan melalui penerapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, pengadaan aplikasi *Internal Capital Adequacy Assesment Process* (ICAAP) dan profil risiko cabang.

10. Menurunkan NPL

    Selain melakukan penagihan secara intensif dan restrukturisasi kredit, upaya lainnya yang dilakukan antara lain :

    - Meningkatkan kerjasama dengan KPKNL untuk penyelesaian/pelelangan agunan
    - Optimalisasi kerja sama dengan BPKP dan Asdatun Kejati/Kejari khusus mediasi penyelesaian kredit bermasalah

11. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

    Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi antara lain dilakukan melalui IT *Security System,* pembangunan infrastruktur Data *Centre* di gedung kantor pusat, pengadaan *Server* AS/400 *Power* 8, *hardware* dan *software network,* peremajaan perangkat *networking,* data *warehouse, penetration test security, assesment* dan *review* tata kelola IT dan pengukuran *maturity level* dan penyusunan rencana strategis IT 2017-2021, Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP Elektronik, sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Program OJK, WAN Optimization, Implementasi NSICCS, Penyiapan Infrastruktur *Call Center,* Pengembangan Aplikasi *e-Form,* Pengembangan Aplikasi *Payroll Online,* Implementasi *Finger Print* untuk Login dan *Overide* Otorisasi.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank Riau Kepri telah mentransparansikan informasi produk dan layanan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penerapan mengenai transparansi informasi produk Bank saat ini telah dapat diketahui nasabah melalui berbagai media komunikasi antara lain seperti :

1. Website Bank Riau Kepri (www.bankriaukepri.co.id)

2. Brosur/leaflet dan iklan
3. Pengumuman yang dipasang/disebarkan di jaringan kantor-kantor Cabang Bank
4. Penjelasan lisan dari petugas *frontliner* Bank

Terkait kebijakan transparansi, Bank saat ini telah memiliki Ketentuan Direksi tentang Transparansi Produk Bank, sebagaimana tertuang di dalam SK Direksi No. 13/KEPDIR/2006 tanggal 01 Februari 2006 tentang Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Bank Riau.

Untuk kebijakan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan melekat di masing-masing kewajiban pelaporan Bank, seperti laporan LBU, LHBU, Laporan tahunan dll.

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia/OJK dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, dan lengkap sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

Salah satu bentuk pengungkapan transparansi kondisi keuangan Bank antara lain sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada lembaga keuangan bukan Bank, Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
3. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disajikan pada *Home Page* Bank Riau Kepri.

KEPEMILIKAN SAHAM DAN *SHARES OPTION*

Bank Riau Kepri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan dengan kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah kota dan kabupaten yang berada di wilayah Riau dan Kepri.

Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada Bank Riau Kepri, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan

Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Selama dan dalam periode pelaporan tahun 2017 Bank Riau Kepri tidak memiliki opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Sepanjang tahun 2017 terdapat 3 (tiga) penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Riau Kepri dengan indikasi kerugian lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Internal *Fraud* dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017
Total *Fraud*	-	-	1	3	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	3	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	PHI	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Upaya Perdamaian)	-	1	-
Dalam proses penyelesaian	1	1	8
Total	1	2	8

Dari total 11 (sebelas) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, 10 (sepuluh) diantaranya masih dalam proses penyelesaian dan 1 (satu) permasalahan hukum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang terdiri dari 2 (dua) pemasalahan hukum Perdata, 8 (delapan) permasalahan hukum Pidana dan 1 (satu) permasalahan hubungan industrial. Dari beberapa permasalahan hukum tersebut, beberapa diantaranya telah mendapat putusan Pengadilan Negeri setempat, namun Penggugat ataupun Tergugat dalam permasalahan hukum tersebut mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini (per Desember 2017) proses banding masih berjalan dan belum mendapat kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana tabel berikut :

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Bank
1	Gugatan perdata oleh Esdelina (Penggugat) melawan Rieke Kambei (Tergugat 1) dan Bank Riau Kepri Cabang Batam (Turut Tergugat)	Telah berkekuatan hukum tetap, dimana putusan majelis hakim adalah menolak gugatan Penggugat	Risiko atas jaminan debitur apabila perkara tersebut di kabulkan oleh majelis hakim
2	Gugatan oleh mantan Pegawai Tidak Tetap Supir (Sdr. Muhammad Novian) pada Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang	Pada PHI Tanjungpinang gugatan Penggugat ditolak oleh majelis hakim. Selanjutnya Penggugat mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung RI	Risiko terhadap hak-hak yang akan diterima oleh Penggugat apabila permohonan kasasi ybs di kabulkan oleh majelis hakim MA.
3	Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Tembilahan atas permasalahan pada penyaluran kredit Cabang Tembilahan	Saat ini masih dalam proses penyidikan pada Kejaksaan Negeri Tembilahan	Risiko terhadap reputasi, risiko kredit serta risiko operasional
4	Penyelidikan oleh Polda Riau atas pencairan Bank Garansi debitur pada Cabang Dumai	Saat ini masih dalam proses penyelidikan pada Polda Riau	Risiko terhadap reputasi, risiko kredit serta risiko operasional
5	Penyelidikan oleh Polda Riau atas penyaluran kredit pada Bank Riau Kepri Capem Sorek	Saat ini masih dalam proses penyelidikan pada Polda Riau	Risiko terhadap reputasi, risiko kredit serta risiko operasional
6	Penyelidikan oleh Polda Riau atas penyaluran kredit pada Bank Riau Kepri Capem Dalu-Dalu	Saat ini masih dalam proses penyelidikan pada Polda Riau	Risiko terhadap reputasi, risiko kredit serta risiko operasional
7	Penyelidikan oleh Polda Riau atas penyaluran kredit pada Bank Riau Kepri Capem A. Yani	Saat ini masih dalam proses penyelidikan pada Polda Riau	Risiko terhadap reputasi, risiko kredit serta risiko operasional
8	Penyelidikan oleh Polda Riau atas penyaluran kredit pada Bank Riau Kepri Capem Syariah Duri	Saat ini masih dalam proses penyelidikan pada Polda Riau	Risiko terhadap reputasi, risiko kredit serta risiko operasional
9	Laporan oleh Bank Riau Kepri atas terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun	Saat ini masih dalam proses penyeldikan Polres Tanjung Balai Karimun	Risiko terhadap reputasi, risiko kredit serta risiko operasional
10	Laporan oleh Bank Riau Kepri atas terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pada PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Duri	Saat ini masih dalam proses penyeldikan Polsek Mandau Duri	Risiko terhadap reputasi, risiko kredit serta risiko operasional

BUY BACK SHARES DAN *BUY BACK* OBLIGASI BANK

Pada tahun 2011 Bank menerbitkan Obligasi I dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi.

Sampai saat ini Bank belum pernah melakukan *buy back shares dan buy back* atas obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri berkomitmen dalam melaksanakan GCG di seluruh aspek yang dimiliki dengan berlandaskan pada 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance.* Dalam pelaksanaan GCG, perlu dilakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Laporan Pelaksanaan GCG ini disusun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai ketentuan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, bahwasanya jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan DPS dipimpin oleh 1 (satu) orang yang ditunjuk dari anggota DPS.

DPS PT. Bank Riau Kepri terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Dr. H. Suryan Al Jamrah,MA (ketua) dan Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA (anggota). Kedua anggota DPS tersebut diangkat pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.15/5/DPbS/PAdBS/Pbr dan Surat Rekomendasi DSN-MUI No.U-400/DSN-MUI/XI/2011.

Kedua anggota DPS tersebut menjabat sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah selama (empat) tahun terhitung tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 13 Februari 2017 Diperpanjang untuk 4 (empat) tahun kedepan mulai tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara RUPSLB No.11 Tanggal 09 Februari 2018 dihadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH.

Berikut susunan DPS Bank Riau Kepri :

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Surat Rekomendasi DSN-MUI	Surat Keputusan Bank Indonesia	Masa Jabatan
1.	Dr. H. Suryan Al Jamrah,MA	Ketua	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/PAd BS/Pbr	Tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 13 Februari 2017 dan diperpanjang sampai 4 (empat) tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Febuari 2021
2.	Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA	Anggota	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/PAd BS/Pbr	

Adapun masa Jabatan DPS selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2013 sebagaimana tertuang dalam akta RUPSLB Nomor 19 yang dibuat dihadapan Notaris Refizal,SH.,MHum dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 23/KEPDIR/2013 tanggal 26 Februari 2013. Diperpanjang untuk 4 (empat) tahun kedepan mulai tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara RUPSLB No.11 Tanggal 09 Februari 2018 dihadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Direksi Bank Riau Kepri telah menerbitkan SK Direksi Nomor 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Berisi mengenai pendahuluan dan latar belakang penyusunan, dasar hukum, serta pengertian-pengertian

Bab II : Berisi uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai kedudukan DPS, persyaratan anggota DPS, tugas dan tanggung jawab DPS, mekanisme penetapan anggota DPS, jumlah dan perangkapan keanggotaan DPS, rapat DPS, masa jabatan DPS, serta hak dan fasilitas anggota DPS dan ketentuan lainnya.

Bab III : Pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, berisi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru dan terhadap kegiatan Unit Usaha Syariah serta tata cara pelaporan DPS.

Bab IV : Objek material pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa Unit Usaha Syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syariah.

Bab V : Lampiran-lampiran.

Selama tahun 2017 DPS Bank Riau Kepri telah melakukan aktivitas dan rapat yang merupakan realisasi dari tugas dan tanggung jawab DPS.

Opini dan Aktivitas Dewan Pengawas Syariah

Realisasi tugas dan tanggung jawab dalam hal menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS, DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS PT. Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip syariah untuk laporan keuangan tahun buku 2017, pernyataan ini dilampirkan di Laporan Aktifitas DPS yang dilaporkan per semester pada tahun 2017.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk dan memberikan opini syariah dari pengeluaran produk tersebut adalah DPS telah ikut mengawasi selama proses pembuatan produk baru UUS dengan mengadakan rapat koordinasi antara Divisi Syariah dan Kantor Cabang Syariah.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya, UUS PT. Bank Riau Kepri telah memenuhi semua permintaan data yang diminta oleh DPS, baik pada saat proses audit yang rutin ataupun permintaan yang bersifat insidentil.

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS, DPS melakukan pengawasan terhadap Bank dan terhadap

penerbitan produk dan aktifitas baru maka DPS dalam hal ini memberikan opini/pendapat, apakah telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Pendapat dimaksud disampaikan dalam bentuk opini dan Surat Keterangan Dewan Pengawas Syariah.

Untuk tahun 2017 DPS PT. Bank Riau Kepri telah memberikan opini sebagai berikut:

1. Opini Nomor 01/DPS-BRKS/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Pembiayaan Sindikasi PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.
2. Opini Nomor 02/DPS-BRKS/II/2017 tanggal 04 Mei 2017 tentang Usulan keikutsertaan Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau Kepri dalam pemberian Pembiayaan sindikasi kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN).

Dapat disampaikan juga DPS PT. Bank Riau Kepri telah melaporkan Laporan Semester I dan II Hasil Pengawasan DPS tahun 2017 secara tepat waktu ke Otoritas Jasa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Direksi PT. Bank Riau Kepri, Komisaris PT. Bank Riau Kepri dan Dewan Syariah Nasional – MUI, hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Realisasi kegiatan yang telah disebutkan di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kegiatan DPS selama tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Aktivitas DPS	Tempat	Keterangan
1	20 Maret 2017	Rapat pembahasan laporan GCG Syariah tahun laporan 2016	Ruang rapat lt.11 MDM Bank Riau Kepri	Ketua DPS
2	3 April 2017	Upacara HUT Bank Riau Kepri-51	Lapangan Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	Ketua DPS
3	20 April 2017	Rapat Membahas Kebijakan Pembiayaan Sindikasi	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
4.	26 April 2017	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
5	4 Mei 2017	Rapat membahas Pemberian Pembiayaan Sindikasi kepada PT. PLN	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
6	8 Juni 2017	Rapat Rencana Pengembangan Produk Pembiayaan	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
7	19 Juli 2017	Rapat Pembahasan Jadwal Pengawasan DPS	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
8	24 Juli 2017	Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Tanjung Balai Karimun	KCPS Tg Balai Karimun	Ketua DPS dan Staff Div Syariah

9	26 Juli 2017	Pemeriksaan DPS ke Cabang Syariah Tanjung	KCS Tg Pinang	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
10	28 Juli 2017	Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Batam	KCPS Batam	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
11	1 Agustus 2017	Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
12	3 Agustus 2017	Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Talukkuantan	KCPS Talukkuantan	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
13	7 Agustus 2017	Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Pasir	KCPS Pasir Pengarayan	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
14	8 Agustus 2017	Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Duri	KCPS Duri	Anggota DPS dan Staff Div Syariah
15	11 Agustus 2017	Pemeriksaan DPS ke Cabang Syariah Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Anggota DPS dan Staff Div Syariah
16	2-3 November 2017	Ijtima' Sanawi DPS se-Indonesia	Tanah Abang, Jakarta	Ketua DPS
17	07 Desember 2017	Tausiyah kepada karyawan/i di Mushola BRK	Mushola MDM BRK	Anggota DPS

Frekuensi Rapat

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Selama tahun 2017 DPS PT. Bank Riau Kepri telah mengikuti rapat intern UUS PT. Bank Riau Kepri dan Rapat ekstern dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebanyak 15 (lima belas) kali.

Berikut tabel frekuensi Rapat DPS selama tahun 2017 :

Nama	Tingkat Kehadiran		Total Kehadiran
	Rapat Intern dengan PT. Bank Riau Kepri	Rapat Ekstern dengan DSN-MUI	
Dr. H. Suryan Al Jamrah	12	1	13
Drs. KH. Tengku Zulkarnain,MA	2	0	2

Berikut rincian rapat yang diikuti oleh DPS selama tahun 2017 :

No	Tanggal	Aktivitas DPS	Tempat	Keterangan
1	20 Maret 2017	Rapat pembahasan laporan GCG Syariah tahun laporan 2016	Ruang rapat lt.11 MDM Bank Riau Kepri	Ketua DPS

2	20 April 2017	Rapat Membahas Kebijakan Pembiayaan Sindikasi	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
3	26 April 2017	Rapat Rutin DPS	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
4	4 Mei 2017	Rapat membahas Pemberian Pembiayaan Sindikasi kepada PT. PLN	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
5	8 Juni 2017	Rapat Rencana Pengembangan Produk Pembiayaan	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
6	19 Juli 2017	Rapat Pembahasan Jadwal Pengawasan DPS	Ruang Rapat Lt.11 MDM BRK	Ketua DPS dan Tim Div. Syariah
7	24 Juli 2017	Rapat membahas hasil Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Tanjung Balai Karimun	KCPS Tg Balai Karimun	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
8	26 Juli 2017	Rapat membahas hasil Pemeriksaan DPS ke Cabang Syariah Tanjung	KCS Tg Pinang	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
9	28 Juli 2017	Rapat membahas hasil Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Batam	KCPS Batam	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
10	1 Agustus 2017	Rapat membahas hasil Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
11	3 Agustus 2017	Rapat membahas hasil Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Talukkuantan	KCPS Talukkuantan	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
12	7 Agustus 2017	Rapat membahas hasil Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Pasir	KCPS Pasir Pengarayan	Ketua DPS dan Staff Div Syariah
13	8 Agustus 2017	Rapat membahas hasil Pemeriksaan DPS ke Capem Syariah Duri	KCPS Duri	Anggota DPS dan Staff Div Syariah
14	11 Agustus 2017	Rapat membahas hasil Pemeriksaan DPS ke Cabang Syariah Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Anggota DPS dan Staff Div Syariah
15	2-3 November 2017	Ijtima' Sanawi DPS se-Indonesia	Tanah Abang, Jakarta	Ketua DPS

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS

Remunerasi yang dimaksud adalah penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.

Fasilitas lain yang dimaksud adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Berikut tabel Remunerasi dan Fasilitas lainnya DPS Bank Riau Kepri :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	2	Rp463.46,-
2.	Fasilitas lainnya :	-	-
	a. Yang dapat dimiliki	-	-
	b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-
Total			Rp463.46,-

Jumlah anggota DPS Bank Riau Kepri yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-
Rp. 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Permasalahan Hukum Yang Terjadi

Yang dimaksud dengan "*internal fraud*" adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan *"mempengaruhi kondisi keuangan UUS PT. Bank Riau Kepri secara signifikan"* adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk penyimpangan (*internal fraud*) sebagaimana yang disebut diatas telah terjadi pada UUS PT. Bank Riau Kepri selama tahun 2017, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Internal *Fraud* dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017
Total *Fraud*	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Yang dimaksud dengan "*permasalahan hukum*" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun 2017 dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk permasalahan hukum sebagaimana yang dimaksud tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	2	2
Total	2	2

Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang dimaksud adalah pendapatan yang didapatkan dari usaha berbasis bunga (ribawi) atau bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan bunga dari penempatan dana antar Bank pada Bank Konvensional.

Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri selama tahun 2017 tidak ada memiliki pendapatan dari pendapatan non halal sebagaimana dimaksud di atas.

Penggunaan Konsultan atau Penasehat

Pada tahun 2017 Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau Kepri menggunakan jasa Konsultan sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
1	PT. Batasa Taskia	Jasa Konsultan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Kajian dan Pendamping *Spin Off* UUS BPD Riau Kepri	Telah Selesai

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya Bank Riau Kepri telah menyediakan dana untuk kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan.

Sepanjang tahun 2017 Bank telah memberikan bantuan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dengan total sebesar Rp21.870.203.636,- yang terbagi atas Dana Kemitraan dan Dana Bantuan Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Kemitraan

No.	Kegiatan	Nominal
1	Pendidikan	Rp3.226.940.000,-
2	Kesehatan	Rp552.172.500,-
3	Adat/Budaya/Seni	Rp138.999.998,-
4	Sosial	Rp7.692.065.409,-
5	Keagamaan	Rp3.411.430.410,-
6	Dukungan Operasional Pemerintah	Rp1.752.949.626,-
7	Pemuda dan Olahraga	Rp183.502.000,-
Total		**Rp16.958.059.943,-**

2. Dana Bantuan Kemasyarakatan

No.	Kegiatan	Nominal
1	Ketenagakerjaan	Rp2.343.000.000,-
2	Pemuda dan Olahraga	Rp323.359.000,-
3	Adat/Budaya/Seni	Rp29.825.000,-
4	Sosial Budaya	Rp746.003.893,-
5	Bantuan Lingkungan Hidup	Rp92.958.000,-
6	Agama	Rp718.275.500,-
7	Pendidikan	Rp286.577.078,-
8	Kesehatan	Rp500.000,-
9	Bencana/Kebencanaan	Rp371.645.222,-
Total		**Rp4.912.143.693,-**

KEGIATAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK TAHUN 2017

Penilaian Penerapan Tata Kelola oleh Pihak Eksternal (*Third party assessment)*

Salah satu kegiatan penerapan Tata Kelola yang dilaksanakan oleh Bank pada tahun 2017 adalah *third party assessment* (penilaian penerapan Tata Kelola oleh Pihak Eksternal). *Third party assessment* dilaksanakan melalui kegiatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA.

CGPI merupakan kegiatan riset serta pemeringkatan penerapan Tata Kelola yang Baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset, yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* dengan tujuan melakukan perbaikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*) serta melakukan evaluasi dan studi banding (*benchmarking*). Program riset dan pemeringkatan CGPI yang telah diselenggarakan sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini merupakan upaya kontribusi IICG dalam mendorong praktik Tata Kelola yang Baik di Indonesia.

IICG merupakan lembaga independen yang melaksanakan kajian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan implementasi tata kelola korporasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan konsep, praktik dan manfaat Tata Kelola yang Baik demi terciptanya dunia usaha yang tepercaya dan berkelanjutan.

Atas kegiatan CGPI yang telah diikuti, Bank mendapat rating **"*Trusted Company*"** dengan total nilai yang diperoleh sebesar 78,39 dari total skor 100 dengan rincian sebagai berikut :

Aspek Penilaian	Nilai
Governance Structure	26,16
Governance Process	26,63
Governance Outcome	25,60
Total Nilai	**78,39**

Penghargaan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perwujudan dari penguatan tata kelola perusahaan yang terus dilakukan, sepanjang tahun 2017, Bank berhasil memperoleh sejumlah penghargaan di bidang tata kelola perusahaan yang menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan. Penghargaan yang diraih sebagai berikut :

PENGHARGAAN BANK DI BIDANG TATA KELOLA PERUSAHAAN		
Penghargaan	**Instansi Penyelenggara**	**Aspek yang Dinilai**
Top CSR *Improvement* 2017	Business News Indonesia bekerjasaman dengan KNKG dan CSR *Society* Indonesia	Penerapan program CSR secara efektif dan berkualitas
Peringkat 3 *Good Corporate Govermance* Kategori BUMD Non Tbk	Economic Review	Laporan Keuangan Audited, Laporan Tahunan, Kelengkapan *Infra-structure* GCG, Kelengkapan *Soft-structure* GCG dan Keterbukaan atas Masalah yang dihadapi Perusahaan
Perusahaan Terpercaya pada *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) *Award* 2017	*The Indonesian Institute for Corporate Governance* dan Majalah SWA	Implementasi Tata Kelola yang Baik pada Bank

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank diwajibkan melaksanakan Penilaian Sendiri *(self assesment)* Penerapan Tata Kelola secara berkala yang dilakukan untuk setiap semester. Pelaporan Penilaian Sendiri *(self assesment)* Penerapan Tata Kelola dilakukan secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB).

Untuk laporan Penilaian Sendiri *(self assesment)* Penerapan Tata Kelola Bank dalam rangka Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2017 disusun sesuai dengan format sebagaimana lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola		
Peringkat		Definisi Peringkat
Individual	**3**	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Analisis

Untuk laporan penerapan Tata Kelola periode tahun 2016, Bank telah melakukan Penilaian Sendiri (*self assesment)* Penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik yang termuat di dalam *Governance Structure, Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*.

Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome.*

Governance Structure

1. Aspek positif

   a. Jumlah Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi dua orang Komisaris Independen dan satu orang Komisaris Non Independen. Hal ini telah memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam :

      - Pasal 23 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
      - Pasal 24 ayat 2 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
      - Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Bank.

   b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya

yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu bentuk pembelajaran yang berkelanjutan antara lain adalah dengan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berbagai pelatihan/seminar maupun workhsop terkait dengan bidang tugasnya.

c. Saat ini seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris telah diketuai oleh Komisaris Independen sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank.

   Meskipun masih terdapat 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen yang sama, namun hal ini tidak melanggar ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank.

d. Sepanjang periode laporan, Bank telah melakukan peningkatan kompetensi dalam bentuk pemberian pelatihan, *workshop* dan sosialisasi kepada pegawai analis, pemimpin seksi, auditor kantor cabang, pemimpin cabang, cabang pembantu dan kedai.

   Dalam pemenuhan kecukupan SDM, Bank telah melakukan rekrutmen pegawai setingkat PTT untuk posisi *Relationship Officer* (RO) dan *Funding Officer* (FO).

2. Aspek Negatif

   a. Terdapat organ Direksi Bank yang belum terpenuhi (diisi) yaitu Direktur Dana & Jasa serta Direktur Kredit & Syariah berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank terkini.

   b. Bank telah mengajukan 4 (empat) calon Direksi guna melengkapi struktur Direksi Bank, namun dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, 3 (tiga) calon Direksi yang diajukan belum memenuhi persyaratan dan 1 (satu) calon Direksi Bank sedang diajukan kembali untuk dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan.

Governance Process

1. Aspek positif

   a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat/arahan kepada Direksi antara lain dalam bentuk :

      - arahan tindak lanjut komitmen Bank kepada pihak regulator;
      - arahan untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari auditor internal Bank;
      - arahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Bank sesuai Rencana Bisnis Bank.

   b. Direksi telah melakukan pemantauan jaringan kantor dengan mengundang pemimpin jaringan kantor, khususnya untuk kantor-kantor yang memiliki trend peningkatan NPL dan performa dalam pencapaian target yang belum optimal.

c. Sepanjang periode laporan *self assesment* ini, Bank telah menindaklanjuti temuan yang memiliki komitmen dari bulan Juli – Desember 2017 sebanyak 112 komitmen. Dari seluruh komitmen tersebut Bank telah menyelesaikan 96% komitmen (107 komitmen dari total 112 komitmen) dan hanya 4% (5 komitmen) yang belum sesuai komitmen Bank dengan OJK.

d. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank telah melakukan review dan perubahan atas pedoman pelaksanaan audit dengan menerbitkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) SKAI untuk menggantikan pedoman pelaksanaan audit sebelumnya yaitu BPP *Risk Based Audit.*

e. Untuk penyediaan dana dalam jumlah besar Bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui mekanisme pengujian kepatuhan terhadap pemberian kredit yang merupakan kewenangan memutus Rapat Direksi.

2. Aspek Negatif

a. Masih terdapat kelemahan dalam pemberian dan pemantauan kredit akibat adanya pelanggaran ketentuan perkreditan.

b. Sepanjang periode laporan masih terdapat pelanggaran yang belum diputuskan sanksinya oleh manajemen Bank.

c. Peningkatan mutu dan kualitas keterampilan auditor belum memberikan hasil optimal untuk kepentingan audit seperti audit IT dan Treasury.

d. Masih terdapat kelemahan dalam proses perolehan dan pengisian data oleh petugas Bank khususnya untuk data SID, serta supervisi terhadap proses pelaporan dan ketentuan internal terkait SID yang belum memadai.

Governance Outcome

1. Aspek positif

a. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Hal ini terlihat dari penyampaian Rencana Bisnis Bank dan realisasinya kepada seluruh jenjang organisasi Bank pada setiap rapat kinerja triwulanan.

b. Bank telah menyampaikan laporan-laporan secara lengkap dan tepat waktu seperti laporan publikasi, laporan keuangan, laporan tingkat kesehatan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola, laporan BMPK dan laporan-laporan lainnya kepada pihak regulator maupun pihak-pihak terkait lainnya.

c. Bank memperoleh predikat sebagai salah satu Perusahaan Terpercaya dari lembaga The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) serta berbagai penghargaan lainnya di sektor perbankan.

2. Aspek Negatif

   a. Sepanjang periode pelaporan masih terdapat :

      - laporan peristiwa *fraud* yang terjadi pada jaringan kantor Bank.
      - teguran/sanksi dari OJK kepada Bank atas keterlambatan penyampaian rencana pembukaan jaringan kantor pada hari libur untuk kegiatan operasional.
      - denda akibat kesalahan pelaporan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) posisi 31 Agustus 2017 serta kesalahan penyampaian laporan SID akibat ketidakakuratan pelaporan dan lemahnya supervisi atasan terhadap proses pelaporan.

   b. Di dalam RUPS Tahunan 2017 belum tersedia laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang disampaikan kepada RUPS.

   c. Pencapaian target Bank tahun 2017 belum tercapai sesuai target RBB. Hal ini terlihat dari masih terdapat deviasi dalam realiasi pencapaian target Bank sesuai Rencana Bisnis Bank antara lain tidak tercapainya target penyaluran kredit, DPK dan target pencapaian laba.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Mambang Mit	**Irvandi Gustari**
Komisaris Utama	Direktur Utama